

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN
ANGGARAN
2025

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

Provinsi Jawa Tengah





**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

Halaman

I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	
II	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	
III	Neraca Komparatif SKPD	
IV	Laporan Operasional SKPD	
V	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	
VI	Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1	Pendahuluan	
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	4
Bab 2	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	
	2.1. Ekonomi Makro	6
	2.2. Kebijakan Keuangan	7
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	10
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	15
Bab 4	Kebijakan Akuntansi	
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	16
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16
	4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	16
Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
	5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	
	5.1.1 Belanja Daerah	18
	5.1.2 Belanja Operasional	18
	5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	
	5.3.1 Beban Daerah	25
	5.3.2 Ekuitas	42
	5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	
	5.3.1 Beban Daerah	43
	5.3.2 Surplus Defisit Non Operasional	48
	5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	49
Bab 6	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	50
Bab 7	Penutup	55
	Lampiran Tambahan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2025



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 19820331 200012 1 001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pajak Daerah		-	-	-	-
Retribusi Daerah		-	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		-	-	-	-
				-	
PENDAPATAN TRANSFER				-	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
				-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				-	
Pendapatan Hibah		-	-	-	-
Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		-	-	-	-
				-	
BELANJA DAERAH				-	
BELANJA OPERASI				-	
Belanja Pegawai		9.551.133.000,00	8.354.175.849,00	87,47	9.277.636.106,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		4.470.634.000,00	3.837.565.320,00	85,84	3.909.549.190,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN		5.080.499.000,00	4.516.610.529,00	88,90	5.150.726.916,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-	-	217.360.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
Belanja Pegawai BOSP		-	-	-	-
Belanja Pegawai BLUD		-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa		18.837.626.000,00	18.546.058.417,00	98,45	19.728.684.731,00
Belanja Barang		3.069.153.000,00	3.064.078.311,00	99,83	2.682.767.600,00
Belanja Jasa		11.271.073.000,00	11.008.345.665,00	97,67	8.734.114.397,00
Belanja Pemeliharaan		477.257.000,00	463.687.016,00	97,16	774.949.305,00
Belanja Perjalanan Dinas		4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BOSP		-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
Belanja Bunga		-	-	-	-
Belanja Subsidi		-	-	-	-
Belanja Hibah		170.473.390.000,00	168.838.390.000,00	99,04	828.885.626.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,39	84.817.555.000,00
Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP		-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		198.862.149.000,00	195.738.624.266,00	98,43	857.891.946.837,00
				-	
BELANJA MODAL				-	
Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
Belanja Modal Tanah BLUD		-	-	-	-

URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00
Belanja Modal Alat Besar		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Angkutan		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		147.375.000,00	124.225.700,00	84,29	69.960.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		59.000.000,00	58.000.000,00	98,31	-
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Peralengkapan		-	-	-	-
Belanja Modal Komputer		193.625.000,00	174.548.000,00	90,15	775.347.000,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Jumlah Belanja Transfer		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAERAH		199.262.149.000,00	196.095.397.966,00	98,41	858.737.253.837,00
SURPLUS/DEFISIT		(199.262.149.000,00)	(196.095.397.966,00)	98,41	(858.737.253.837,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan		-	-	-	-
Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan		-	-	-	-
Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
Pembentukan Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(199.262.149.000,00)	(196.095.397.966,00)	98,41	(858.737.253.837,00)

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak Daerah		-	-
Piutang Retribusi Daerah		-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
Piutang Lainnya		-	-
Penyisihan Piutang		-	-
Beban Dibayar Dimuka		18.689.594,02	18.036.341,58
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah		18.689.594,02	18.036.341,58
Persediaan		698.000,00	10.967.000,00
Barang Pakai Habis		698.000,00	10.967.000,00
Barang Tak Habis Pakai		-	-
Barang Bekas Dipakai		-	-
JUMLAH ASET LANCAR		19.387.594,02	29.003.341,58
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
ASET TETAP			
Tanah		12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
Tanah		12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
Peralatan dan Mesin		10.272.603.723,00	10.117.085.249,00
Alat Besar		640.150.000,00	689.909.226,00
Alat Angkutan		3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-
Alat Pertanian		-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga		3.848.217.199,00	3.782.386.499,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		730.201.000,00	699.001.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-
Alat Laboratorium		-	-
Alat Persenjataan		-	-
Komputer		1.969.377.124,00	1.861.130.124,00
Alat Eksplorasi		-	-
Alat Pengeboran		-	-
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
Alat Bantu Eksplorasi		-	-
Alat Keselamatan Kerja		-	-

URAIAN	REFF	2025	2024
Alat Peraga		-	-
Peralatan Proses/Produksi		-	-
Rambu-rambu		-	-
Peralatan Olahraga		-	-
Gedung dan Bangunan		6.951.230.085,00	6.951.230.085,00
Bangunan Gedung		6.819.580.085,00	6.819.580.085,00
Monumen		-	-
Bangunan Menara		-	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti		131.650.000,00	131.650.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Jalan dan Jembatan		-	-
Bangunan Air		-	-
Instalasi		-	-
Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		80.619.400,00	80.619.400,00
Bahan Perpustakaan		80.619.400,00	80.619.400,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-
Hewan		-	-
Biota Perairan		-	-
Tanaman		-	-
Barang Koleksi Non Budaya		-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		(12.228.184.515,12)	(11.796.198.368,53)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(9.203.924.259,52)	(8.914.523.668,80)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(3.024.260.255,60)	(2.881.674.699,73)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
Aset Koneksi Jasa		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Koneksi Jasa		-	-
JUMLAH ASET TETAP		17.087.411.692,88	17.363.879.365,47
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi		-	-
Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk		-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
Aset Tak Berwujud		369.689.460,00	371.457.780,00
Aset Tak Berwujud		369.689.460,00	371.457.780,00
Aset Koneksi Jasa Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain		512.601.059,00	1.741.301.417,00
Aset Lain-Lain		512.601.059,00	1.741.301.417,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(246.523.129,96)	(218.271.606,89)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(246.523.129,96)	(218.271.606,89)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka		-	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		123.166.330,04	156.722.173,11

URAIAN	REF	2025	2024
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi Tanah		-	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		-	-
JUMLAH ASET		17.229.965.616,94	17.549.604.880,16
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Utang Belanja		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
Utang kepada Masyarakat		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah		-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
EKUITAS		(178.865.432.349,06)	(841.187.648.956,84)
Ekuitas		17.549.604.880,16	17.013.916.870,80
Surplus/Defisit-LO		(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)
Ekuitas SAL		-	-
Estimasi Pendapatan		-	-
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
Apropriasi Belanja		-	-
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-
Estimasi Perubahan SAL		-	-
Surplus/Defisit-LRA		-	-
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		196.095.397.966,00	858.737.253.837,00
RK PPKD		196.095.397.966,00	858.737.253.837,00
JUMLAH EKUITAS		17.229.965.616,94	17.549.604.880,16
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		17.229.965.616,94	17.549.604.880,16

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SAMPUNG TENGAH



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 198203312000121001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PENDAPATAN - LO					
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	-
Retribusi Daerah - LO		-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	-
Lain-Lain PAD yang Sah - LO		-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER - LO					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
Pendapatan Hibah- LO		-	-	-	-
Dana Darurat- LO		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH -LO		-	-	-	-
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai		8.354.175.849,00	9.277.636.106,00	(923.460.257,00)	(9,95)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN		3.837.565.320,00	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)	(1,84)
Beban Tambahan Penghasilan ASN		4.516.610.529,00	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
Beban Pegawai BOS		-	-	-	-
Beban Pegawai BOSP		-	-	-	-
Beban Pegawai BLUD		-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa		18.522.942.484,56	19.432.724.144,14	(909.781.659,58)	(4,68)
Beban Barang		3.074.347.311,00	2.642.986.100,00	431.361.211,00	16,32
Beban Jasa		10.974.960.732,56	8.674.545.087,14	2.300.415.645,42	26,52
Beban Pemeliharaan		463.687.016,00	578.339.528,00	(114.652.512,00)	(19,82)
Beban Perjalanan Dinas		4.009.947.425,00	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-	-	-
Beban Penunjang Otonomi Khusus		-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa BOSP		-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
Beban Bunga		-	-	-	-
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah		-	-	-	-
Beban Subsidi		-	-	-	-
Beban Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
Beban Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
Beban Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
Beban Hibah		168.838.390.000,00	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		31.082.470.000,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
Beban Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
Beban Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		99.669.738.000,00	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,51
Beban Hibah Dana BOS		-	-	-	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
Beban Hibah Dana BOSP		-	-	-	-
Beban Hibah kepada BUMDesa		-	-	-	-
Beban Hibah kepada Koperasi		-	-	-	-

Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	695.992.895,66	605.579.577,50	90.413.318,16	14,93
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	490.655.816,72	409.345.449,46	81.310.367,26	19,86
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	142.585.555,87	136.436.623,72	6.148.932,15	4,51
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	62.751.523,07	59.797.504,32	2.954.018,75	4,94
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
Beban Imbalan	-	-	-	-
Beban Imbalan Sukuk Daerah	-	-	-	-
Jumlah Beban Operasional	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Jumlah Beban Transfer	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(196.411.501.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.790.064.598,42	(77,11)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
Jumlah Defisit Non Operasional	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)
POS LUAR BIASA				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

NO	URAIAN	2025	2024
1	Ekuitas Awal	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80
2	Surplus/Defisit-LO	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)
3	RK PPKD	196.095.397.966,00	858.737.253.837,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	20.021.875,00
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	(55.726.900,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		22.350.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		(78.076.900,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	75.748.775,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		(2.328.125,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		78.076.900,00
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Pemanfaatan		

4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya		
4.13	Koreksi/Penyesuaian Properti Investasi	-	-
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Properti Investasi		
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Properti Investasi dari Mutasi Antar SKPD		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Properti Investasi		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Properti Investasi dari Mutasi Antar SKPD		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Properti Investasi	-	-
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Properti Investasi		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Properti Investasi		
4.15	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Pendapatan Diterima Dimuka		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Pendapatan Diterima Dimuka		
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Pegawai		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Pegawai		
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Barang dan Jasa		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa		
4.16	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain		
5	Ekuitas Akhir	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP. MM
NIP. 198203312000121001



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol selama satu periode pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada periode 2024, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan:

5.3 Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

5.4 Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

5.5 Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

5.6 Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5.7 Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Disamping itu, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

5.7.1.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

5.7.1.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

5.7.1.1.3 Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.7.1.1.4 Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

5.7.1.1.5 Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0011108 Tanggal 19 November 2025 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0011108 Tanggal 19 November 2025 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

- 5.1.1. Pendapatan
- 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Beban
 - 5.3.2. Surplus Defisit Non Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB 7 PENUTUP

LAMPIRAN TAMBAHAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi 5,28% (yoy) pada Triwulan II 2025, lebih tinggi dari nasional (5,12%). Secara triwulanan (qtq), pertumbuhan Jawa Tengah sebesar 1,87% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Dengan kontribusi sebesar 14,43% terhadap perekonomian Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati posisi keempat terbesar. Tingkat inflasi Agustus 2025 juga terkendali di level 2,48% (yoy), dengan inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Rembang (2,82%) dan terendah di Kota Surakarta (2,09%).

Indikator kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari 9,58% pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin 3,37 juta jiwa atau berkurang 29,65 ribu orang. Ketimpangan pendapatan turut membaik dengan rasio sebesar 0,359, menurun dari 0,364 pada September 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 tercatat 4,33%, turun dibandingkan Februari 2024 (4,39%) dan lebih baik dari nasional (4,76%).

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2025 berada di angka 108,5, yang menandakan optimisme masyarakat tetap terjaga. Indikator sektoral juga mendukung seperti Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2025 tercatat 116,35, naik dari Juli 2025 (115,59), terutama ditopang subsektor hortikultura dan tanaman pangan. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) turut mengalami peningkatan menjadi 99,79 dari 98,92 pada Juli 2025. Capaian positif kesejahteraan ini tidak lepas dari peran APBN sebagai instrumen fiskal utama, melalui belanja negara dan Transfer ke Daerah yang memperkuat ketahanan ekonomi serta mendukung program perlindungan sosial, infrastruktur, dan sektor produktif masyarakat Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik merilis, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III (Juli-September) 2025 sebesar 5,37 persen secara *Year On Year*. BPS mencatat, pertumbuhan itu lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,04 persen. Sejumlah faktor turut mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Di antaranya, pertumbuhan aktivitas barang dan jasa di Jawa Tengah. Tercatat, ekspor nonmigas pada periode yang sama (Triwulan III 2025 dibanding Triwulan 2024) tumbuh 22,69 persen secara tahunan. Kemudian jumlah penumpang kereta api, pesawat, dan pengguna jalan bebas hambatan juga bertambah. Selain itu, sektor investasi juga berdampak, ditandai dengan kenaikan impor barang modal secara konsisten, sejalan dengan kebutuhan mesin untuk industri.

Kontribusi ekonomi Jawa Tengah didominasi empat lapangan usaha yaitu industri pengolahan yang menyumbang 33,43 persen, perdagangan menyumbang 13,44 persen, pertanian menyumbang 12,88 persen, dan sektor konstruksi menyumbang 11,82 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian

Jateng dengan kontribusi sebesar 60,64 persen. Secara regional antarprovinsi se-Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati urutan kedua pertumbuhan ekonomi YoY tertinggi di Triwulan III, dengan 5,37 persen. Provinsi DI Yogyakarta mencatat pertumbuhan 5,40 persen, Banten 5,29 persen, Jawa Timur dengan 5,22 persen, Jawa Barat 5,20 persen dan DKI Jakarta 4,96 persen. Pulau Jawa ada enam provinsi, Jateng merupakan provinsi besar yang memiliki pertumbuhan tertinggi kedua setelah Yogyakarta. Kontribusi perekonomian Jawa Tengah sebesar 14,50 persen terhadap perekonomian di pulau Jawa, atau 8,22 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat, dengan tetap mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dengan membuat kebijakan sebagai petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan APBD maupun kebijakan mendukung pelaksanaan teknis kegiatan.

2.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di SKPD

Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi:

- 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan adaptif;
- 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Jika dilihat lebih lanjut dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, maka telah dirumuskan juga keterkaitan antara indikator daerah dan perangkat daerah dimana Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah akan mendukung sasaran ke 4 yakni terkait dengan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dimana tujuan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan

Politik dengan indikator Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan, sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya stabilitas politik dan Meningkatnya ketahanan bangsa. Sasaran dan tujuan tersebut dilaksanakan melalui:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

2.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2024 direncanakan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh antara lain melalui:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- b. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
- c. Peningkatan penagihan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Tengah melalui program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura), dan program Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (BUDIMAN);
- d. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak;
- e. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (*New Sakpole*);
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
- g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;

- h. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- i. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi Online (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
- j. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- k. Penguatan kelembagaan dan sinergi antar BUMD dan Perangkat Daerah serta mengembangkan potensi usaha; dan
- l. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah provinsi agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

2.2.3 Kebijakan Belanja SKPD

Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah setelah perubahan adalah sebesar Rp199.262.149.000,00. Struktur belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari SKPD yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
 - a) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
 - b) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan manfaat;
 - c) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, serta hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
 - d) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yaitu Belanja Peralatan dan Mesin, terdiri dari:
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga, yaitu Mebel dan Alat Pendingin
 - Belanja Modal Komputer, yaitu Komputer Unit



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB III

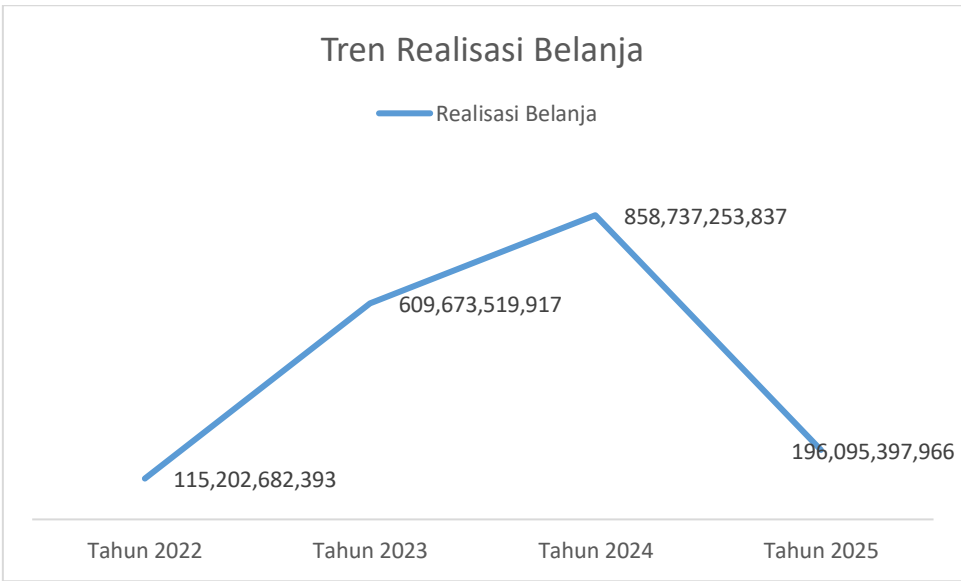
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

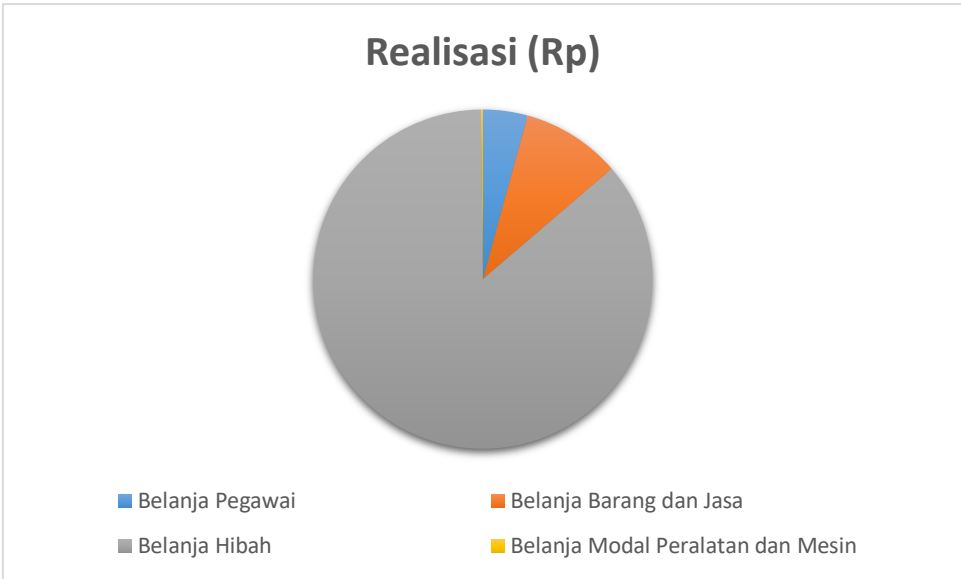
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Perkembangan Realisasi Belanja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:



Grafik 1 Tren Realisasi Belanja Badan Kesbangpol (2022-2025)

Proporsi realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Grafik 2 Proporsi Realisasi Belanja Badan Kesbangpol Tahun 2024

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang	Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
5	BELANJA DAERAH	199.262.149.000	196.095.397.966	98,41	3.166.751.034	
5.1	BELANJA OPERASI	198.862.149.000	195.738.624.266	98,43	3.123.524.734	
5.1.1	Belanja Pegawai	9.551.133.000	8.354.175.849	87,47	1.196.957.151	Adanya Pegawai Pensiun dan Beberapa Jabatan Struktural masih kosong, sehingga anggaran yang disiapkan tidak terealisasi
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.470.634.000	3.837.565.320	85,84	633.068.680	Gaji PPPK yang baru masuk dibayarkan mulai bulan Juli, sedangkan anggaran nya dari awal tahun
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.137.274.000	2.892.407.927	92,19	244.866.073	
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.783.186.000	2.566.677.279	92,22	216.508.721	
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	354.088.000	325.730.648	91,99	28.357.352	
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	312.382.000	253.721.267	81,22	58.660.733	
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	270.088.000	235.172.539	87,07	34.915.461	
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	42.294.000	18.548.728	43,86	23.745.272	
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193.942.000	102.130.000	52,66	91.812.000	
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	193.942.000	102.130.000	52,66	91.812.000	
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.200.000	81.900.000	59,69	55.300.000	
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	81.886.000	64.400.000	78,65	17.486.000	
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	55.314.000	17.500.000	31,64	37.814.000	
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.406.000	84.410.000	92,35	6.996.000	
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.406.000	84.410.000	92,35	6.996.000	
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	166.800.000	140.301.680	84,11	26.498.320	
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	139.116.000	123.765.780	88,97	15.350.220	
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.684.000	16.535.900	59,73	11.148.100	
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.032.000	24.373.557	22,35	84.658.443	
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	109.032.000	24.373.557	22,35	84.658.443	
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	112.000	37.790	33,74	74.210	
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.000	31.676	56,56	24.324	
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	56.000	6.114	10,92	49.886	
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	264.295.000	234.750.261	88,82	29.544.739	
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	235.410.000	219.858.322	93,39	15.551.678	
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.885.000	14.891.939	51,56	13.993.061	
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.776.000	5.883.178	60,18	3.892.822	

5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.362.000	5.154.062	61,64	3.207.938	
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.414.000	729.116	51,56	684.884	
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.084.000	17.649.660	70,36	7.434.340	
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.084.000	15.462.380	70,02	6.621.620	
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.000.000	2.187.280	72,91	812.720	
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.331.000	0	0	23.331.000	Tidak ada realisasi Tapera
5.1.1.1.12.1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.744.000	0	0	18.744.000	
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.587.000	0	0	4.587.000	
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.080.499.000	4.516.610.529	88,9	563.888.471	
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.080.499.000	4.516.610.529	88,9	563.888.471	
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.025.201.000	4.476.110.529	89,07	549.090.471	Jabatan struktural Kepala Badan dan Kepala Bidang masih kosong, sehingga tidak terealisasi
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	55.298.000	40.500.000	73,24	14.798.000	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.837.626.000	18.546.058.417	98,45	291.567.583	
5.1.2.1	Belanja Barang	3.069.153.000	3.064.078.311	99,83	5.074.689	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.868.903.000	2.863.864.400	99,82	5.038.600	
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	147.648.000	147.600.000	99,97	48.000	
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	394.888.000	393.976.000	99,77	912.000	
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.059.000	131.060.400	99,24	998.600	
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.483.000	4.136.000	92,26	347.000	Penggunaan lebih sedikit
5.1.2.1.1.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	57.607.000	57.607.000	100	0	
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.013.000	16.013.000	100	0	
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.068.000	19.068.000	100	0	
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	227.280.000	226.064.000	99,46	1.216.000	
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	89.400.000	89.325.000	99,92	75.000	
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.646.637.000	1.645.195.000	99,91	1.442.000	
5.1.2.1.1.76	Belanja Pakaian Olahraga	34.300.000	34.300.000	100	0	
5.1.2.1.1.77	Belanja Pakaian Paskibraka	99.520.000	99.520.000	100	0	
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	200.250.000	200.213.911	99,98	36.089	
5.1.2.1.4.35	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200.250.000	200.213.911	99,98	36.089	
5.1.2.2	Belanja Jasa	11.271.073.000	11.008.345.665	97,67	262.727.335	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	10.922.642.000	10.668.339.699	97,67	254.302.301	

5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.938.955.000	5.855.363.000	98,59	83.592.000	
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	386.850.000	349.200.000	90,27	37.650.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan: Perhitungan awal honor dimulai bulan Juni, tetapi karena pergeseran dilakukan di bulan Oktober, sehingga honor di bulan sebelum pengesahan tidak bisa di belanjakan
						Bidang Poldagri: KPA Poldagri purna tugas / pensiun
5.1.2.2.1.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.600.000	18.600.000	100	0	
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.873.600.000	1.859.200.000	99,23	14.400.000	
5.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.625.000	3.625.000	100	0	
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	570.110.000	563.873.300	98,91	6.236.700	
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	417.812.000	417.512.908	99,93	299.092	
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000.000	499.850.000	99,97	150.000	
5.1.2.2.1.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	56.696.000	52.731.680	93,01	3.964.320	Efisiensi
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000	20.000.000	100	0	
5.1.2.2.1.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	7.500.000	7.500.000	100	0	
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	368.407.000	366.855.000	99,58	1.552.000	
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000	23.991.775	99,97	8.225	
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	13.200.000	8.445.500	63,98	4.754.500	Penggunaan lebih hemat
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	331.800.000	305.162.536	91,97	26.637.464	Penggunaan lebih hemat
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.737.000	6.737.000	100	0	
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	34.750.000	22.992.000	66,16	11.758.000	Sesuai tagihan Bapenda
5.1.2.2.1.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	350.000.000	286.700.000	81,91	63.300.000	PA dan beberapa KPA masih kosong
5.1.2.2.2	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	162.660.000	158.789.115	97,62	3.870.885	
5.1.2.2.2.5	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	69.638.000	66.768.000	95,88	2.870.000	Beberapa Non ASN diterima menjadi PPPK
5.1.2.2.2.6	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.329.000	6.908.880	94,27	420.120	
5.1.2.2.2.7	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.693.000	5.572.800	97,89	120.200	
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	80.000.000	79.539.435	99,42	460.565	
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	98.350.000	98.350.000	100	0	
5.1.2.2.4.34	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	67.950.000	67.950.000	100	0	
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.400.000	30.400.000	100	0	
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.800.000	18.800.000	86,24	3.000.000	
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.800.000	18.800.000	86,24	3.000.000	Beberapa kegiatan tidak menggunakan sewa ruang
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	65.621.000	64.066.851	97,63	1.554.149	

	Pelatihan					
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.608.000	24.066.851	97,8	541.149	
5.1.2.2.12.2	Belanja Sosialisasi	16.405.000	16.000.000	97,53	405.000	
5.1.2.2.12.3	Belanja Bimbingan Teknis	24.608.000	24.000.000	97,53	608.000	
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	477.257.000	463.687.016	97,16	13.569.984	
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.898.000	85.991.744	95,65	3.906.256	
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000	7.000.000	100	0	
5.1.2.3.2.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.157.000	3.474.744	48,55	3.682.256	Efisiensi
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.921.000	1.900.000	98,91	21.000	
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.970.000	22.867.000	99,55	103.000	
5.1.2.3.2.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	50.850.000	50.750.000	99,8	100.000	
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	387.359.000	377.695.272	97,51	9.663.728	
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.554.000	45.604.848	92,03	3.949.152	
5.1.2.3.3.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	328.155.000	322.440.424	98,26	5.714.576	
5.1.2.3.3.36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	9.650.000	9.650.000	100	0	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.143.000	4.009.947.425	99,75	10.195.575	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.020.143.000	4.009.947.425	99,75	10.195.575	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.715.946.000	2.707.662.425	99,7	8.283.575	
5.1.2.4.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	2.963.000	98,77	37.000	
5.1.2.4.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.605.000	101.605.000	100	0	
5.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.199.592.000	1.197.717.000	99,84	1.875.000	
5.1.5	Belanja Hibah	170.473.390.000	168.838.390.000	99,04	1.635.000.000	
5.1.5.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000	31.082.470.000	100	0	
5.1.5.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000	31.082.470.000	100	0	
5.1.5.1.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000	31.082.470.000	100	0	
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	101.304.738.000	99.669.738.000	98,39	1.635.000.000	
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	101.304.738.000	99.669.738.000	98,39	1.635.000.000	
5.1.5.5.3.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	101.304.738.000	99.669.738.000	98,39	1.635.000.000	

5.1.5.7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000	38.086.182.000	100	0	
5.1.5.7.1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000	38.086.182.000	100	0	
5.1.5.7.1.1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000	38.086.182.000	100	0	
5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	356.773.700	89,19	43.226.300	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000	356.773.700	89,19	43.226.300	
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	147.375.000	124.225.700	84,29	23.149.300	
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	147.375.000	124.225.700	84,29	23.149.300	
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	50.000.000	47.558.700	95,12	2.441.300	
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	41.250.000	35.997.000	87,27	5.253.000	Efisiensi
5.2.2.5.2.6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.125.000	40.670.000	72,46	15.455.000	Efisiensi
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	59.000.000	58.000.000	98,31	1.000.000	
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	59.000.000	58.000.000	98,31	1.000.000	
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	59.000.000	58.000.000	98,31	1.000.000	
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	193.625.000	174.548.000	90,15	19.077.000	
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	193.625.000	174.548.000	90,15	19.077.000	
5.2.2.10.1.2	Belanja Modal Personal Computer	193.625.000	174.548.000	90,15	19.077.000	Efisiensi
	Jumlah Belanja	199.262.149.000	196.095.397.966	98,41	3.166.751.034	
	Surplus/(Defisit)	0	- 196.095.397.966	100	196.095.397.966	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	- 196.095.397.966	100	196.095.397.966	

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi. Hanya saja, dalam pengelolaan belanja terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu penginputan transaksi belanja pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) terhambat karena aplikasi yang terlalu sering error pada jam kerja.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Basis AkruaI dan Basis Kas. Basis AkruaI digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan, Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi aset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan aset tetap. Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai aset tetap.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, maka

komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JATENG

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penjelasan mengenai anggaran dan realisasi APBD TA 2025 adalah sebagai berikut:

5.1.1 BELANJA DAERAH Rp196.095.397.966,00

5.1.2	BELANJA DAERAH						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Operasional	198.862.149.000,00	195.738.624.266,00	98,43	857.891.946.837,00	(662.153.322.571,00)	(77,18)
2	Belanja Modal	400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00	(488.533.300,00)	(57,79)
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
Jumlah		199.262.149.000,00	196.095.397.966,00	98,41	858.737.253.837,00	(662.641.855.871,00)	(77,16)

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp199.262.149.000,00 dengan realisasi sebesar Rp196.095.397.966,00 atau 98,41 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp858.737.253.837,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp662.641.855.871,00 atau 77,16 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2 BELANJA OPERASIONAL Rp195.738.624.266,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp198.862.149.000,00 dengan realisasi sebesar Rp195.738.624.266,00 atau 98,43 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp857.891.946.837,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp662.153.322.571,00 atau 77,18 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1	BELANJA OPERASIONAL						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	9.551.133.000,00	8.354.175.849,00	87,47	9.277.636.106,00	(923.460.257,00)	(9,95)
2	Belanja Barang dan Jasa	18.837.626.000,00	18.546.058.417,00	98,45	18.728.684.731,00	(1.182.626.314,00)	(5,99)
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	170.473.390.000,00	168.838.390.000,00	99,04	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Jumlah		198.862.149.000,00	195.738.624.266,00	98,43	857.891.946.837,00	(662.153.322.571,00)	(77,18)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp8.354.175.849,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp9.551.133.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.354.175.849,00 atau 87,47 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.277.636.106,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp923.460.257,00 atau 9,95 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.470.634.000,00	3.837.565.320,00	85,84	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)	(1,84)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.080.499.000,00	4.516.610.529,00	88,90	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/v/KDH	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/v/KDH	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		9.551.133.000,00	8.354.175.849,00	87,47	9.277.636.106,00	(923.460.257,00)	(9,95)

Belanja Pegawai **tidak mencapai target*** dikarenakan :

- a) Adanya Pegawai Pensiun dan Beberapa Jabatan Struktural masih kosong, sehingga anggaran yang disiapkan tidak terealisasi

b) Gaji PPPK yang baru masuk dibayarkan mulai bulan Juli, sedangkan anggaran nya dari awal tahun

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.837.565.320,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp4.470.634.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.837.565.320,00 atau 85,84 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.909.549.190,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp71.983.870,00 atau 1,84 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.137.274.000,00	2.892.407.927,00	92,19	2.891.795.600,00	612.327,00	0,02
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	312.382.000,00	253.721.267,00	81,22	269.843.030,00	(16.121.763,00)	(5,97)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193.942.000,00	102.130.000,00	52,66	138.740.000,00	(36.610.000,00)	(26,39)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.200.000,00	81.900.000,00	59,69	79.940.800,00	1.959.200,00	2,45
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	314.06.000,00	84.410.000,00	92,35	92.530.000,00	(8.120.000,00)	(8,78)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	166.800.000,00	140.301.680,00	84,11	140.784.480,00	(482.800,00)	(0,34)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.032.000,00	24.373.557,00	22,35	22.793.470,00	1.580.087,00	6,93
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	112.000,00	37.790,00	33,74	39.426,00	(1.636,00)	(4,15)
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	264.295.000,00	234.750.261,00	88,82	249.358.710,00	(14.608.449,00)	(5,86)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.776.000,00	5.883.178,00	60,18	5.930.880,00	(47.702,00)	(0,80)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.084.000,00	17.649.660,00	70,36	17.792.794,00	(143.134,00)	(0,80)
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.331.000,00	-	-	-	-	-
13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Zakat ASN	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4.470.634.000,00	3.837.565.320,00	85,84	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)	(1,84)

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp4.516.610.529,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp5.080.499.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.516.610.529,00 atau 88,90 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.150.726.916,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp634.116.387,00 atau 12,31 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.080.499.000,00	4.516.610.529,00	88,90	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5.080.499.000,00	4.516.610.529,00	88,90	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp217.360.000,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp217.360.000,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Honorarium	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)

5.1.2.1.2 **Belanja Barang dan Jasa Rp18.546.058.417,00**

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp 18.837.626.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.546.058.417,00 atau 98,45 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.728.684.731,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp 1.182.626.314,00 atau 5,99 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang	3.069.153.000,00	3.064.078.311,00	99,83	2.682.767.600,00	381.310.711,00	14,21
2	Belanja Jasa	11.271.073.000,00	11.008.345.665,00	97,67	8.734.114.397,00	2.274.231.268,00	26,04
3	Belanja Pemeliharaan	477.257.000,00	463.687.016,00	97,16	774.949.305,00	(311.262.289,00)	(40,17)
4	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		18.837.626.000,00	18.546.058.417,00	98,45	19.728.684.731,00	(1.182.626.314,00)	(5,99)

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.1.2.1 **Belanja Barang Rp3.064.078.311,00**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp 3.069.153.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.064.078.311,00 atau 99,83 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 2.682.767.600,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 181.096.800,00 atau 6,75 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.1	Belanja Barang						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang Habis Pakai	2.868.903.000,00	2.863.864.400,00	99,82	2.682.767.600,00	181.096.800,00	6,75
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	200.250.000,00	200.213.911,00	99,98	-	-	-
Jumlah		3.069.153.000,00	3.064.078.311,00	99,83	2.682.767.600,00	181.096.800,00	6,75

5.1.2.1.2.2 **Belanja Jasa Rp 11.008.345.665,00**

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp 11.271.073.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.008.345.665,00 atau 97,67 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 8.734.114.397,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.274.231.268,00 atau 26,04 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.2	Belanja Jasa						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	10.922.642.000,00	10.668.339.699,00	97,67	8.281.265.524,00	2.387.074.175,00	28,82
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	162.660.000,00	158.789.115,00	97,62	167.612.873,00	(8.823.758,00)	(5,26)
3	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	98.350.000,00	98.350.000,00	100,00	115.546.000,00	(17.196.000,00)	(14,88)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.800.000,00	18.800.000,00	86,24	109.690.000,00	(90.890.000,00)	(82,86)
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	65.621.000,00	64.066.851,00	97,63	60.000.000,00	4.066.851,00	6,78
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Jumlah		11.271.073.000,00	11.008.345.665,00	97,67	8.734.114.397,00	2.274.231.268,00	26,04

5.1.2.1.2.3 **Belanja Pemeliharaan Rp463.687.016,00**

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 477.257.000,00 dengan realisasi sebesar Rp463.687.016,00 atau 97,16 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp774.949.305,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 311.262.289,00 atau 40,17 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-		-	-	
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.898.000,00	85.991.744,00	95,65	299.953.158,00	(213.961.414,00)	(71,33)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	387.359.000,00	377.695.272,00	97,51	474.996.147,00	(97.300.875,00)	(20,48)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		-	-	
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-		-	-	
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-		-	-	
Jumlah		477.257.000,00	463.687.016,00	97,16	774.949.305,00	(311.262.289,00)	(40,17)

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp4.009.947.425,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 4.020.143.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.009.947.425,00 atau 99,75 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.536.853.429,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 3.526.906.004,00 atau 46,80 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-		-	-	
Jumlah		4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)

5.1.2.1.3 Belanja Hibah Rp168.838.390.000,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp 170.473.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp168.838.390.000,00 atau 99,04 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp828.885.626.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 660.047.236.000,00 atau 79,63 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5 Belanja Hibah		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	14.852.183.000,00	
3	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-		-	-	
4	Belanja Hibah kepada BUMD	-	-		-	-	
5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,39	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,51
6	Belanja Hibah Dana BOS	-	-		-	-	
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.096.182.000,00	38.096.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
8	Belanja Hibah Dana BOSP	-	-		-	-	
Jumlah		170.473.390.000,00	168.838.390.000,00	99,04	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)

5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp 31.082.470.000,00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp 31.082.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.082.470.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp708.739.472.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 677.657.002.000,00 atau 95,61 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-		-	-	
3	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-		-	-	
Jumlah		31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)

Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	5.552.500.000,00	5.552.500.000,00	100,00	4.063.250.000,00	1.489.250.000,00
2	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng Pengamanan Pemilu (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	21.029.970.000,00	21.029.970.000,00	100,00	62.696.843.000,00	(41.666.873.000,00)
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	474.965.178.000,00	(474.965.178.000,00)

4	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo (Jl. Adi Soemarmo Malangwijan Colonadu Pulosari, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, KAB. KARANGANYAR)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	205.000.000,00	295.000.000,00
5	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang (Jl. Re. Martadinata No.12, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00
6	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap (Jl. Niaga No. 2 Klega, Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, KAB. CILACAP)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	125.000.000,00	375.000.000,00
7	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal (Jl. Proklamasi, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah, KOTA TEGAL)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100.000.000,00
8	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-	250.000.000,00
9	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	116.230.722.000,00	(116.230.722.000,00)
11	Komando Operasi Udara II pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman (Area Sawah, Wirasaba, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, KAB. PURBALINGGA)	-	-	-	125.000.000,00	(125.000.000,00)
12	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	7.545.329.000,00	(7.545.329.000,00)
13	Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Jawa Tengah (Jl. Untung Suropati Kota Semarang, KOTA SEMARANG)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	650.000.000,00	350.000.000,00
14	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
15	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
16	Komando Daerah MiliterIV/Diponegoro (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	2.655.000.000,00	(2.655.000.000,00)
17	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	900.000.000,00	(900.000.000,00)
18	Komando Resor Militer 071/Wijayakusuma	-	-	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
19	Komando Resor Militer 073/Makutarama	-	-	-	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
20	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	28.428.150.000,00	(28.428.150.000,00)
	Jumlah	31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)

5.1.2.1.3.2 **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp 99.669.738.000,00**

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp 101.304.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp

99.669.738.000,00 atau 98,39%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 84.817.555.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 14.852.183.000,00 atau 17,51 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5.2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		-	-	
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan terdaftar	-	-		-	-	
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,386058	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,510742
4	Belanja Hibah kepada Koperasi	-	-		-	-	
5	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	-	-		-	-	
6	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-		-	-	
Jumlah		101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,39	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,51

5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp 38.086.182.000,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp 38.086.182.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.086.182.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 35.328.599.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.757.583.000,00 atau 7,81% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5.4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
Jumlah		38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81

Rincian Partai Politik

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.540.522.000,00	10.540.522.000,00	100,00	11.436.936.000,00	(896.414.000,00)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.072.928.000,00	6.072.928.000,00	100,00	5.629.037.000,00	443.891.000,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.185.772.000,00	5.185.772.000,00	100,00	3.892.255.000,00	1.293.517.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	3.242.138.000,00	3.242.138.000,00	100,00	2.729.993.000,00	512.145.000,00
5	Partai Golongan Karya	4.507.394.000,00	4.507.394.000,00	100,00	3.775.870.000,00	731.524.000,00
6	Partai Demokrat	2.319.820.000,00	2.319.820.000,00	100,00	2.045.608.000,00	274.212.000,00
7	Partai Amanat Nasional	1.681.634.000,00	1.681.634.000,00	100,00	1.713.433.000,00	(31.799.000,00)
8	Partai Persatuan Pembangunan	2.028.070.000,00	2.028.070.000,00	100,00	2.153.618.000,00	(125.548.000,00)
9	Partai Solidaritas Indonesia	956.126.000,00	956.126.000,00	100,00	318.709.000,00	637.417.000,00
10	Partai Nasional Demokrat	1.551.778.000,00	1.551.778.000,00	100,00	1.633.140.000,00	(81.362.000,00)
Jumlah		38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp 356.773.700,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 356.773.700,00 atau 89,19 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 845.307.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 488.533.300,00 atau 57,79 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2	BELANJA MODAL						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-		-	-	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00	(488.533.300,00)	(57,79)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		-	-	
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	-	
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	-	
Jumlah		400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00	(488.533.300,00)	(57,79)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp356.773.700,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp356.773.700,00 atau 89,19 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya

sebesar Rp845.307.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 488.533.300,00 atau 57,79 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-		-	-	
2	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-		-	-	
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-		-	-	
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-		-	-	
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	147.375.000,00	124.225.700,00	84,29	69.960.000,00	54.265.700,00	77,57
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	59.000.000,00	58.000.000,00	98,31	-	58.000.000,00	
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-		-	-	
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-		-	-	
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-		-	-	
10	Belanja Modal Komputer	193.625.000,00	174.548.000,00	90,15	775.347.000,00	(600.799.000,00)	(77,49)
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-		-	-	
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-		-	-	
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-		-	-	
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-		-	-	
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-		-	-	
16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-		-	-	
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-		-	-	
18	Belanja Modal Rambau-rambu	-	-		-	-	
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-		-	-	
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-		-	-	
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	-	-		-	-	
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-		-	-	
Jumlah		400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00	(488.533.300,00)	(57,79)

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp124.225.700,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp 147.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 124.225.700,00 atau 84,29 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69.960.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 54.265.700,00 atau 77,57 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor	-	-		-	-	
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	147.375.000,00	124.225.700,00	84,29	69.960.000,00	54.265.700,00	77,57
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-		-	-	
Jumlah		147.375.000,00	124.225.700,00	84,29	69.960.000,00	54.265.700,00	77,57

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp58.000.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp59.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.000.000,00 atau 98,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp58.000.000,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Studio	59.000.000,00	58.000.000,00	98,31	-	58.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-		-	-	
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-		-	-	
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-		-	-	
Jumlah		59.000.000,00	58.000.000,00	98,31	-	58.000.000,00	100,00

5.1.2.2.1.3 Belanja Modal Komputer Rp,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 193.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.548.000,00 atau 90,15 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp775.347.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 600.799.000,00 atau 77,49 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Komputer		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Komputer Unit	193.625.000,00	174.548.000,00	90,15	775.347.000,00	(600.799.000,00)	(77,49)
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-		-	-	
Jumlah		193.625.000,00	174.548.000,00	90,15	775.347.000,00	(600.799.000,00)	(77,49)

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp 17.229.965.616,94

Total Aset sebesar Rp 17.229.965.616,94 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.549.604.880,16 mengalami **penurunan** sebesar Rp 319.639.263,22 atau 1,82%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Lancar	19.387.594,02	29.003.341,58
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	17.087.411.692,88	17.363.879.365,47
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	123.166.330,04	156.722.173,11
6	Properti Investasi	-	-
	Jumlah	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 19.387.594,02

Aset Lancar sebesar Rp 19.387.594,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 29.003.341,58 mengalami **penurunan** sebesar Rp 9.615.747,56 atau 33,15% dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1.1	ASET LANCAR		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas		-	-
2	Investasi Jangka Pendek		-	-
3	Piutang Pajak Daerah		-	-
4	Piutang Retribusi Daerah		-	-
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
9	Piutang Lainnya		-	-
10	Penyisihan Piutang		-	-
11	Beban Dibayar Dimuka		18.689.594,02	18.036.341,58
12	Persediaan		698.000,00	10.967.000,00
	Jumlah		19.387.594,02	29.003.341,58

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp,00

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	
	Jumlah	

5.2.1.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp 18.689.594,02

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 18.689.594,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 18.036.341,58 mengalami **penurunan** sebesar Rp 653.252,44 atau 3,50% dengan rincian

sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	-	-
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	18.689.594,02	18.036.341,58
	Jumlah	18.689.594,02	18.036.341,58

5.2.1.1.1.2 **Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rp,00**

Beban Dibayar Dimuka-Sewa sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah		
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin		
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan		
4	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya		
6	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud		
	Jumlah		

5.2.1.1.1.3 **Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah Rp 18.689.594,02**

Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 18.689.594,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 18.036.341,58 mengalami **penurunan** sebesar Rp 653.252,44 atau 3,50% dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Tanah	-	-
2	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin	14.364.924,48	13.803.065,42
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan	4.324.669,54	4.233.276,16
	Jumlah	18.689.594,02	18.036.341,58

5.2.1.1.2 **Persediaan Rp 698.000,00**

Persediaan sebesar Rp 698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 10.967.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 10.269.000,00 atau 93,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	698.000,00	10.967.000,00
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-
3	Barang Bekas Pakai	-	-
	Jumlah	698.000,00	10.967.000,00

5.2.1.1.2.1 **Barang Pakai Habis Rp 698.000,00**

Barang Pakai Habis sebesar Rp 698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.967.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 10.269.000,00 atau 93,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan	-	-
2	Suku Cadang	-	-
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	698.000,00	10.967.000,00
4	Obat-obatan	-	-

5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7	Natura dan Pakan	-	-
8	Persediaan Penelitian	-	-
9	Persediaan dalam Proses	-	-
Jumlah		698.000,00	10.967.000,00

5.2.1.1.2.1.1 **Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 698.000,00**

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp 698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 10.967.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 10.269.000,00 atau 93,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	430.000,00	6.298.000,00
2	Kertas dan Cover	25.000,00	2.155.000,00
3	Bahan Cetak	-	-
4	Benda Pos	-	-
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6	Bahan Komputer	200.000,00	2.385.000,00
7	Perabot Kantor	25.000,00	96.000,00
8	Alat Listrik	18.000,00	33.000,00
9	Perlengkapan Dinas	-	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12	Suvenir/Cendera Mata	-	-
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
Jumlah		698.000,00	10.967.000,00

5.2.1.2 **Aset Tetap Rp17.087.411.692,88**

Aset Tetap sebesar Rp17.087.411.692,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.363.879.365,47 mengalami **penurunan** sebesar Rp276.467.672,59 atau 1,59% dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3	ASET TETAP		
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
2	Peralatan dan Mesin	10.272.603.723,00	10.117.085.249,00
3	Gedung dan Bangunan	6.951.230.085,00	6.951.230.085,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	80.619.400,00	80.619.400,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.228.184.515,12)	(11.796.198.368,53)
8	Aset Konsesi Jasa	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-
Jumlah		17.087.411.692,88	17.363.879.365,47

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp17.087.411.692,88
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 356.773.700,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 0,00
Hibah	Rp 0,00
Mutasi Masuk	Rp 0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 54.386.700,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	Rp 411.160.400,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 54.386.700,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 201.255.226,00
Mutasi Keluar	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	Rp 255.641.926,00
Grand Total	Rp29.315.596.208,00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2025.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2025 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.2.1 Tanah Rp 12.011.143.000,00

Tanah sebesar Rp 12.011.143.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.011.143.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Tanah Persil	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
2 Tanah Non Persil	-	-
3 Lapangan	-	-
Jumlah	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil Rp,00

Tanah Persil sebesar Rp12.011.143.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.011.143.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3 Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7 Tanah Persil Lainnya	-	-
Jumlah	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp10.272.603.723,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.272.603.723,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.117.085.249,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp155.518.474,00 atau 1,51% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Alat Besar	640.150.000,00	689.909.226,00
2 Alat Angkutan	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4 Alat Pertanian	-	-
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.848.217.199,00	3.782.386.499,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	730.201.000,00	699.001.000,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8 Alat Laboratorium	-	-
9 Alat Persenjataan	-	-
10 Komputer	1.969.377.124,00	1.861.130.124,00
11 Alat Eksplorasi	-	-
12 Alat Pengeboran	-	-
13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14 Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15 Alat Keselamatan Kerja	-	-
16 Alat Peraga	-	-

		-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu-rambu	-	-
19	Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah		10.272.603.723,00	10.117.085.249,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal Rp10.117.085.249,00

Penambahan

Belanja Modal	Rp	356.773.700,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	356.773.700,00

Berkurang

Ekstrakomtabel	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	201.255.226,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	201.255.226,00

Grand Total **Rp10.272.603.723,00**

5.2.1.2.2.1 Alat Besar Rp640.150.000,00

Alat Besar sebesar Rp640.150.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp689.909.226,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp49.759.226,00 atau 7,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Besar Darat	-	-
2	Alat Besar Apung	-	-
3	Alat Bantu	640.150.000,00	689.909.226,00
Jumlah		640.150.000,00	689.909.226,00

5.2.1.2.2.2 Alat Angkutan Rp3.084.658.400,00

Alat Angkutan sebesar Rp3.084.658.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.084.658.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
5	Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
Jumlah		3.084.658.400,00	3.084.658.400,00

5.2.1.2.2.3 **Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.848.217.199,00**

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.848.217.199,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.782.386.499,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp65.830.700,00 atau 1,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Kantor	522.793.440,00	513.393.440,00
2	Alat Rumah Tangga	3.084.551.759,00	3.028.121.059,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	240.872.000,00	240.872.000,00
	Jumlah	3.848.217.199,00	3.782.386.499,00

5.2.1.2.2.4 **Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp730.201.000,00**

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp730.201.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp699.001.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp31.200.000,00 atau 4,27% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Studio	638.501.000,00	607.301.000,00
2	Alat Komunikasi	91.700.000,00	91.700.000,00
3	Peralatan Pemancar	-	-
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
	Jumlah	730.201.000,00	699.001.000,00

5.2.1.2.2.5 **Komputer Rp1.969.377.124,00**

Komputer sebesar Rp1.969.377.124,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.861.130.124,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp108.247.000,00 atau 5,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Komputer Unit	1.337.882.616,00	1.247.452.616,00
2	Peralatan Komputer	631.494.508,00	613.677.508,00
	Jumlah	1.969.377.124,00	1.861.130.124,00

5.2.1.2.3 **Gedung dan Bangunan Rp6.951.230.085,00**

Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.951.230.085,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.951.230.085,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung	6.819.580.085,00	6.819.580.085,00
2	Monumen	-	-
3	Bangunan Menara	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	131.650.000,00	131.650.000,00
	Jumlah	6.951.230.085,00	6.951.230.085,00

5.2.1.2.3.1 **Bangunan Gedung Rp6.819.580.085,00**

Bangunan Gedung sebesar Rp6.819.580.085,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.819.580.085,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.819.580.085,00	6.819.580.085,00
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-
Jumlah	6.819.580.085,00	6.819.580.085,00

5.2.1.2.3.2 **Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp131.650.000,00**

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp131.650.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp131.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Tugu/Tanda Batas	131.650.000,00	131.650.000,00
Jumlah	131.650.000,00	131.650.000,00

5.2.1.2.4 **Aset Tetap Lainnya Rp80.619.400,00**

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp80.619.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.619.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	80.619.400,00	80.619.400,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-
3 Hewan	-	-
4 Biota Perairan	-	-
5 Tanaman	-	-
6 Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7 Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah	80.619.400,00	80.619.400,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp80.619.400,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 0,00
Hibah	Rp 0,00
Mutasi Masuk	Rp 0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp54.386.700,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	Rp54.386.700,00
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp 0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp54.386.700,00
Mutasi Keluar	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	Rp54.386.700,00
Grand Total	Rp80.619.400,00

5.2.1.2.4.1 **Bahan Perpustakaan Rp80.619.400,00**

Bahan Perpustakaan sebesar Rp80.619.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.619.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	80.619.400,00	80.619.400,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4	Musik	-	-
5	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
6	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
7	Tarscalt	-	-
	Jumlah	80.619.400,00	80.619.400,00

5.2.1.2.5 **Akumulasi Penyusutan (Rp12.228.184.515,12)**

Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp12.228.184.515,12) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp11.796.198.368,53) mengalami **kenaikan** sebesar Rp431.986.146,59 atau 3,53% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.203.924.259,52)	(8.914.523.668,80)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.024.260.255,60)	(2.881.674.699,73)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	(12.228.184.515,12)	(11.796.198.368,53)

5.2.1.2.5.1 **Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp9.203.924.259,52)**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp9.203.924.259,52) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp8.914.523.668,8) mengalami **kenaikan** sebesar Rp289.400.590,72 atau 3,14% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(640.150.000,00)	(689.909.226,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.084.658.400,00)	(3.012.529.962,50)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3.079.538.760,53)	(2.929.427.437,56)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(677.385.100,01)	(655.069.900,01)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.722.191.998,98)	(1.627.587.142,73)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-

		-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah		(9.203.924.259,52)	(8.914.523.668,80)

5.2.1.2.5.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Rp640.150.000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar (Rp640.150.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp689.909.226,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp49.759.226,00 atau 7,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(640.150.000,00)	(640.150.000,00)
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	-	(49.759.226,00)
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountaineering	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	-	-
Jumlah		(640.150.000,00)	(689.909.226,00)

5.2.1.2.5.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (Rp3.084.658.400,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar (Rp3.084.658.400,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.012.529.962,5) mengalami **kenaikan** sebesar Rp72.128.437,5 atau 2,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(380.397.000,00)	(332.847.375,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.600.299.400,00)	(2.575.720.587,50)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(103.962.000,00)	(103.962.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-
Jumlah		(3.084.658.400,00)	(3.012.529.962,50)

5.2.1.2.5.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp3.079.538.760,53)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp3.079.538.760,53) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.929.427.437,56) mengalami **kenaikan** sebesar Rp150.111.322,97 atau 4,87% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(2.047.140,00)	(1.592.220,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(100.040.000,00)	(100.040.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(202.211.716,25)	(198.437.887,25)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(167.920.458,80)	(172.303.353,16)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Meubelair	(509.044.703,14)	(479.957.918,14)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(11.930.000,00)	(11.930.000,00)

8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.371.452.983,01)	(1.367.310.333,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(412.778.883,33)	(295.742.850,01)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(59.540.876,00)	(59.540.876,00)
13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(221.722.000,00)	(221.722.000,00)
14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(19.150.000,00)	(19.150.000,00)
17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-	-
Jumlah		(3.079.538.760,53)	(2.929.427.437,56)

5.2.1.2.5.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
(Rp677.385.100,01)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar (Rp677.385.100,01) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp655.069.900,01) mengalami **kenaikan** sebesar Rp22.315.200,00 atau 3,29% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(417.144.466,67)	(404.599.866,67)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(168.540.633,34)	(158.770.033,34)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(91.700.000,00)	(91.700.000,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Satelit	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	-	-

25	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	-	-
51	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	-	-
52	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	-	-
53	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	-	-
54	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	-	-
55	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	-	-
56	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
57	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	-	-
59	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	-	-
60	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	-	-
61	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	-	-
62	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	-	-
63	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	-	-
64	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	-	-
65	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequency Omni Range (VOR)	-	-

68	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	-	-
69	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	-	-
70	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	-	-
71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	-	-
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	-	-
Jumlah		(677.385.100,01)	(655.069.900,01)

5.2.1.2.5.1.5 **Akumulasi Penyusutan Komputer (Rp 1.722.191.998,98)**

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar (Rp1.722.191.998,98) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.627.587.142,73) mengalami **kenaikan** sebesar Rp94.604.856,25 atau 5,49% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.164.814.365,99)	(1.067.918.824,32)
3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(272.680.000,00)	(272.680.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(281.040.341,32)	(259.793.526,74)
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(2.057.291,67)	(25.594.791,67)
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
Jumlah		(1.722.191.998,98)	(1.627.587.142,73)

5.2.1.2.5.2 **Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp3.024.260.255,6)**

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp3.024.260.255,6) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.881.674.699,73) mengalami **kenaikan** sebesar Rp142.585.555,87 atau 4,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.975.934.255,60)	(2.835.981.699,73)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(48.326.000,00)	(45.693.000,00)
Jumlah		(3.024.260.255,60)	(2.881.674.699,73)

5.2.1.2.5.2.1 **Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Rp2.975.934.255,6)**

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar (Rp2.975.934.255,6) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.835.981.699,73) mengalami **kenaikan** sebesar Rp139.952.555,87 atau 4,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.929.980.415,60)	(2.792.822.979,73)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(9.835.980,00)	(8.941.800,00)
3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-

7	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	-	-
25	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(36.117.860,00)	(34.216.920,00)
33	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-

Jumlah	(2.975.934.255,60)	(2.835.981.699,73)
--------	--------------------	--------------------

5.2.1.2.5.2.2 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti (Rp48.326.000,00)

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar (Rp48.326.000,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp45.693.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.633.000,00 atau 5,76% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(3.600.000,00)	(3.000.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	(44.726.000,00)	(42.693.000,00)
	Jumlah	(48.326.000,00)	(45.693.000,00)

5.2.1.3 Aset Lainnya Rp123.166.330,04

Aset Lainnya sebesar Rp123.166.330,04 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp156.722.173,11 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.555.843,07 atau 21,41% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	369.689.460,00	371.457.780,00
4	Aset Lain-lain	512.601.059,00	1.741.301.417,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(246.523.129,96)	(218.271.606,89)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
	Jumlah	123.166.330,04	156.722.173,11

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud Rp369.689.460,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp369.689.460,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp371.457.780,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.768.320,00 atau 0,48% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	369.689.460,00	371.457.780,00
2	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud	-	-
	Jumlah	369.689.460,00	371.457.780,00

5.2.1.3.1.1 Aset Tidak Berwujud Rp369.689.460,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp369.689.460,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp371.457.780,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.768.320,00 atau 0,48% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	-	-
3	Hak Cipta	-	-

4	Hak Paten	-	-
5	Software	369.689.460,00	371.457.780,00
6	Kajian	-	-
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
Jumlah		369.689.460,00	371.457.780,00

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain Rp512.601.059,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp512.601.059,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.741.301.417,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 1.228.700.358,00 atau 240% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	512.601.059,00	1.741.301.417,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Jumlah		512.601.059,00	1.741.301.417,00

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp246.523.129,96)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp246.523.129,96), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp218.271.606,89) mengalami **kenaikan** sebesar Rp28.251.523,07 atau 12,94% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	-	-
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(246.523.129,96)	(218.271.606,89)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-
Jumlah		(246.523.129,96)	(218.271.606,89)

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp512.601.059,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp512.601.059,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.737.765.417,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp1.225.164.358,00 atau 70,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)
Jumlah		(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)

5.2.2 EKUITAS Rp17.229.965.616,94

Ekuitas sebesar Rp17.229.965.616,94 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 17.549.604.880,16 mengalami **penurunan** sebesar Rp319.639.263 atau 1,86% dengan rincian sebagai berikut :

5.3.3 Ekuitas		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ekuitas	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16
2	Ekuitas SAL		
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah		(178.865.432.349,06)	17.549.604.880,16

5.2.2.1 Ekuitas

Ekuitas sebesar -Rp 178.865.432.349,06 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 17.549.604.880,16 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

5.3.3.1 Ekuitas		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ekuitas	17.549.604.880,16	17.549.604.880,16
2	Surplus/Defisit-LO	(196.415.037.229,22)	-
Jumlah		(178.865.432.349,06)	17.549.604.880,16

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3	PENJELASAN REKENING LAPORAN OPERASIONAL						Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban	195.738.624.266,00	724.996.237,24	52.119.274,02	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)
	Surplus/(Defisit) Operasional	(195.738.624.266,00)	(724.996.237,24)	(52.119.274,02)	(196.411.501.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.790.064.598,42	(77,11)
3	Kegiatan Non Operasional	-	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	-
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(195.738.624.266,00)	(728.532.237,24)	(52.119.274,02)	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)
4	Pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(195.738.624.266,00)	(728.532.237,24)	(52.119.274,02)	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

5.3.1 BEBAN DAERAH Rp 196.411.501.229,22

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp 196.411.501.229,22 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 858.201.565.827,64 mengalami **penurunan** sebesar Rp 661.790.064.598,42 atau 77,11% dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2	BEBAN DAERAH						Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Beban Operasional	195.738.624.266,00	724.996.237,24	52.119.274,02	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)
3	Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	195.738.624.266,00	724.996.237,24	52.119.274,02	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)

Total Belanja Daerah :Rp195.738.624.266,00

Penambahan

➤ Penyesuaian Belanja : Rp724.996.237,24
Total Penambahan : Rp724.996.237,24

Pengurangan

➤ Penyesuaian Belanja : 52.119.274,02

Total Pengurangan : Rp52.119.274,02

Total Beban Daerah : 196.411.501.229,22

5.3.1.1 BEBAN OPERASIONAL Rp 196.411.501.229,22

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp 196.411.501.229,22 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 858.201.565.827,64 mengalami **penurunan** sebesar Rp 661.790.064.598,42 atau 77,11% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	8.354.175.849,00	-	-	8.354.175.849,00	9.277.636.106,00	(923.460.257,00)	(9,95)
2	Beban Barang dan Jasa	18.546.058.417,00	29.003.341,58	52.119.274,02	18.522.942.484,56	19.432.724.144,14	(909.781.659,58)	(4,68)
3	Beban Bangsa	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah	168.838.390.000,00	-	-	168.838.390.000,00	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)
6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Pengisian Plutang	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Pengusutan dan Amortisasi	-	695.992.895,66	-	695.992.895,66	605.579.577,50	90.413.318,16	14,93
	Jumlah	195.738.624.266,00	724.996.237,24	52.119.274,02	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)

Total Belanja Daerah :Rp195.738.624.266,00

Penambahan

➤ Penyesuaian Belanja : Rp724.996.237,24
Total Penambahan : Rp724.996.237,24

Pengurangan

➤ Penyesuaian Belanja : 52.119.274,02

Total Pengurangan: Rp52.119.274,02

Total Beban Daerah: 196.411.501.229,22

5.3.1.1.1 Beban Pegawai Rp 8.354.175.849,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp 8.354.175.849,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 9.277.636.106,00 mengalami penurunan sebesar Rp 923.460.257,00 atau 9,95% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.837.565.320,00	-	-	3.837.565.320,00	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)	(1,84)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.516.610.529,00	-	-	4.516.610.529,00	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/KDKH	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Penempatan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDKH	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	8.354.175.849,00	-	-	8.354.175.849,00	9.277.636.106,00	(923.460.257,00)	(9,95)

5.3.1.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.831.682.142,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp 3.831.682.142,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.909.549.190,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 77.867.048,00 atau 1,99% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji Pokok ASN	2.892.407.927,00	-	-	2.892.407.927,00	2.891.795.600,00	612.327,00	0,02
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	253.721.267,00	-	-	253.721.267,00	269.843.030,00	(16.121.763,00)	(5,97)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	102.130.000,00	-	-	102.130.000,00	138.740.000,00	(36.610.000,00)	(26,39)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	81.900.000,00	-	-	81.900.000,00	79.940.800,00	1.959.200,00	2,45
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	84.410.000,00	-	-	84.410.000,00	92.530.000,00	(8.120.000,00)	(8,78)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	140.301.680,00	-	-	140.301.680,00	140.784.480,00	(482.800,00)	(0,34)
7	Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	24.373.557,00	-	-	24.373.557,00	22.793.470,00	1.580.087,00	6,93
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	37.790,00	-	-	37.790,00	39.426,00	(1.636,00)	(4,15)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	234.750.261,00	-	-	234.750.261,00	249.358.710,00	(14.608.449,00)	(5,86)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.883.176,00	-	-	5.883.176,00	5.930.880,00	(5.930.880,00)	(100,00)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	17.649.660,00	-	-	17.649.660,00	17.792.794,00	(143.134,00)	(0,80)
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-	-
14	Beban Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-	-
15	Beban Zakat ASN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.831.682.142,00	-	-	3.831.682.142,00	3.909.549.190,00	(77.867.048,00)	(1,99)

5.3.1.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp 4.516.610.529,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp 4.516.610.529,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 5.150.726.916,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 634.116.387,00 atau 12,31% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.516.610.529,00	-	-	4.516.610.529,00	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.516.610.529,00	-	-	4.516.610.529,00	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)

5.3.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp217.360.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 217.360.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp217.360.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Honorarium	-	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	-	-	-	-	-	-	-
10	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	-	-	-	-	-	-	-
11	Beban Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PPPK	-	-	-	-	-	-	-
12	Beban Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PT)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)

5.3.1.1.2 **Beban Barang dan Jasa Rp 18.522.942.484,56**

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 18.522.942.484,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 19.432.724.144,14 mengalami **penurunan** sebesar Rp 909.781.659,58 atau 4,68% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	3.064.078.311,00	10.967.000,00	698.000,00	3.074.347.311,00	2.642.986.100,00	431.361.211,00	16,32
2	Beban Jasa	11.008.345.665,00	18.036.341,58	51.421.274,02	10.974.960.732,56	8.674.545.087,14	2.300.415.645,42	26,52
3	Beban Pemeliharaan	463.687.016,00	-	-	463.687.016,00	578.339.526,00	(114.652.512,00)	(19,82)
4	Beban Perjalanan Dinas	4.009.947.425,00	-	-	4.009.947.425,00	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	18.546.058.417,00	29.003.341,58	52.119.274,02	18.522.942.484,56	19.432.724.144,14	(909.781.659,58)	(4,68)

Total Belanja Barang dan Jasa : Rp18.546.058.417,00

Penambahan

- Persediaan Awal : Rp10.967.000,00
- Penyesuaian Belanja Dibayar Di Muka : Rp18.036.341,58
- Total Penambahan : Rp29.003.341,58

Pengurangan

- Persediaan Akhir : Rp 698.000,00
- Penyesuaian Belanja Dibayar Di Muka : Rp 18.689.594,02
- Kapitalisasi Aset Tak Berwujud : Rp 32.731.680,00
- Total Pengurangan : Rp 52.119.274,02

Total Beban Barang dan Jasa : Rp18.522.942.484,56

5.3.1.1.2.1 **Beban Barang Rp 3.074.347.311,00**

Beban Barang terealisasi sebesar Rp 3.074.347.311,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.642.986.100,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 431.361.211,00 atau 14,03% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang Pakai Habis	2.863.864.400,00	10.967.000,00	698.000,00	2.874.133.400,00	2.642.986.100,00	231.147.300,00	8,75
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	200.213.911,00	-	-	200.213.911,00	-	200.213.911,00	-
	Jumlah	3.064.078.311,00	10.967.000,00	698.000,00	3.074.347.311,00	2.642.986.100,00	431.361.211,00	16,32

Total Belanja Barang : Rp3.064.078.311,00

Penambahan

- Persediaan Awal : Rp10.967.000,00
- Total Penambahan : Rp10.967.000,00

Pengurangan

- Persediaan Akhir : Rp698.000,00
- Total Pengurangan : Rp698.000,00

Total Beban Barang : Rp 3.074.347.311,00

5.3.1.1.2.2 **Beban Jasa Rp 10.974.960.732,56**

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp 10.974.960.732,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.674.545.087,14 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.300.415.645,42 atau 20,96% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	10.668.339.699,00	-	32.731.680,00	10.635.608.019,00	8.221.307.744,00	2.414.300.275,00	29,37
2	Beban Jasa Asuransi	158.789.115,00	18.036.341,58	18.689.594,02	158.135.862,56	168.001.343,14	(9.865.480,58)	(5,87)
3	Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	98.350.000,00	-	-	98.350.000,00	115.546.000,00	(17.196.000,00)	(14,88)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	18.800.000,00	-	-	18.800.000,00	109.690.000,00	(90.890.000,00)	(82,96)
6	Beban Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-	-
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS/IPPPK	64.066.851,00	-	-	64.066.851,00	60.000.000,00	4.066.851,00	6,78
14	Belanja Jasa Insektisida bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Jasa Insektisida bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
16	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-
17	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
18	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	11.008.345.665,00	18.036.341,58	51.421.274,02	10.974.960.732,56	8.674.545.087,14	2.300.415.645,42	26,52

Total Belanja Jasa : **Rp11.008.345.665,00**

Penambahan

➤ Belanja Dibayar Di Muka Awal : Rp18.036.341,58

Total Penambahan : Rp18.036.341,58

Pengurangan

➤ Belanja Dibayar Di Muka Akhir : Rp18.689.594,02

➤ Kapitalisasi Aset Tak Berwujud : Rp 32.731.680,00

Total Pengurangan : Rp51.421.274,02

Total Beban Jasa : **Rp10.974.960.732,56**

5.3.1.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp 463.687.016,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp 463.687.016,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 578.339.528,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 114.652.512,00 atau 19,82% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.991.744,00	-	-	85.991.744,00	299.953.158,00	(213.961.414,00)	(71,33)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	377.695.272,00	-	-	377.695.272,00	278.386.370,00	99.308.902,00	35,67
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	463.687.016,00	-	-	463.687.016,00	578.339.528,00	(114.652.512,00)	(19,82)

5.3.1.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp 4.009.947.425,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp 4.009.947.425,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7.536.853.429,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 3.526.906.004,00 atau 46,80% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.009.947.425,00	-	-	4.009.947.425,00	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.009.947.425,00	-	-	4.009.947.425,00	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)

5.3.1.1.3 Beban Hibah Rp 168.838.390.000,00

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp 168.838.390.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 828.885.626.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 660.047.236.000,00 atau 79,63% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000,00	-	-	31.082.470.000,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,81)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbad	99.669.738.000,00	-	-	99.669.738.000,00	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,51
6	Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
8	Beban Hibah Dana BOSP	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Hibah kepada BUMDesa	-	-	-	-	-	-	-
10	Beban Hibah kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	168.838.390.000,00	-	-	168.838.390.000,00	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)

5.3.1.1.3.1 **Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp 31.082.470.000,00**

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp 31.082.470.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 708.739.472.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 677.657.002.000,00 atau 95,61% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000	-	-	31.082.470.000,00	708.739.472.000	(677.657.002.000,00)	(95,61)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	31.082.470.000,00	-	-	31.082.470.000,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)

5.3.1.1.3.2 **Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp 38.086.182.000,00**

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp 38.086.182.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 35.328.599.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.757.583.000,00 atau 7,24% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
	Jumlah	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81

5.3.1.2 **BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp 695.992.895,66**

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 695.992.895,66 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 605.579.577,5 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 90.413.318,16 atau 13% dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	490.655.816,72	409.345.449,46	81.310.367,26	19,86
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	142.585.555,87	136.436.623,72	6.148.932,15	4,51
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	62.751.523,07	59.797.504,32	2.954.018,75	4,94
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Aset Konsepsi Jasa	-	-	-	-
9	Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
	Jumlah	695.992.895,66	605.579.577,50	90.413.318,16	14,93

5.3.1.2.1 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp 490.655.816,72**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 490.655.816,72 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 409.345.449,46 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 81.310.367,26 atau 16,57% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	-	-	-	-
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	72.128.437,50	72.128.437,50	-	-
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	235.306.322,97	147.818.124,46	87.488.198,51	59,19
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.315.200,00	38.132.133,34	(15.816.933,34)	(41,48)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Beban Penyusutan Alat Peralatan	-	-	-	-
10	Beban Penyusutan Komputer	160.905.856,25	151.266.754,16	9.639.102,09	6,37
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
	Jumlah	490.655.816,72	409.345.449,46	81.310.367,26	19,86

5.3.1.2.2 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp 142.585.555,87**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp 142.585.555,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 136.436.623,72 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6.148.932,15 atau 4,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	139.952.555,87	133.803.623,72	6.148.932,15	4,60
2	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	-
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.633.000,00	2.633.000,00	-	-
	Jumlah	142.585.555,87	136.436.623,72	6.148.932,15	4,51

5.3.1.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp 62.751.523,07

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp 62.751.523,07 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 59.797.504,32 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.954.018,75 atau % dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL (Rp3.536.000,00)

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar (Rp3.536.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp 3.536.000,00) atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Non Operasional	-	-	-	-
2	Defisit Non Operasional	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	-
	Jumlah	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	-

5.3.2.1 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp 3.536.000,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp 3.536.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.536.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
	Jumlah	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-

5.3.2.1.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Rp 3.536.000,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terealisasi sebesar Rp 3.536.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-
2	Defisit Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
4	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
	Jumlah	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-

5.3.2.1.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp 3.536.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.536.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan Tanah-LO	-	-	-	-
2	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	-	-	-	-
3	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	-	-	-	-
4	Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- LO	-	-	-	-
5	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	-	-	-	-
6	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	-	-	-	-
7	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	-	-	-	-
8	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-
	Jumlah	3.536.000,00	-	3.536.000,00	-

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024		Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80	555.709.884,36	3,27
2	Surplus/Defisit-LO	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)
3	RK-PPKD	196.095.397.966,00	858.737.253.837,00	-	-
4	Koreksi	-	20.021.875,00	(20.021.875,00)	(100,00)
	Ekuitas Akhir	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16	662.322.216.607,78	(173,84)

5.4.1 Ekuitas Awal Rp17.549.604.880,16

Saldo Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp17.549.604.880,16 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80	555.709.884,36	3,27
	Jumlah	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80	555.709.884,36	3,27

5.4.2 Surplus/Defisit – LO Rp Rp196.415.037.229,22

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp196.415.037.229,22) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2025.

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus/Defisit LO	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)
	Jumlah	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp,00

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar (Rp,00,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-	-	-
3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Investasi	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Investasi	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	(55.726.900,00)	55.726.900,00	-
9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	75.748.775,00	(75.748.775,00)	-
10	Koreksi/Penyesuaian Aset	-	-	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	-	-	-
13	Koreksi/Penyesuaian Properti	-	-	-	-
14	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	-	-	-
15	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-	-	-
16	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
	Jumlah	-	20.021.875,00	(20.021.875,00)	(100,00)

5.4.4 Ekuitas Akhir Rp,00

Ekuitas akhir sebesar Rp,00 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16	662.322.216.607,78	(173,84)
	Jumlah	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16	662.322.216.607,78	(173,84)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 6

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

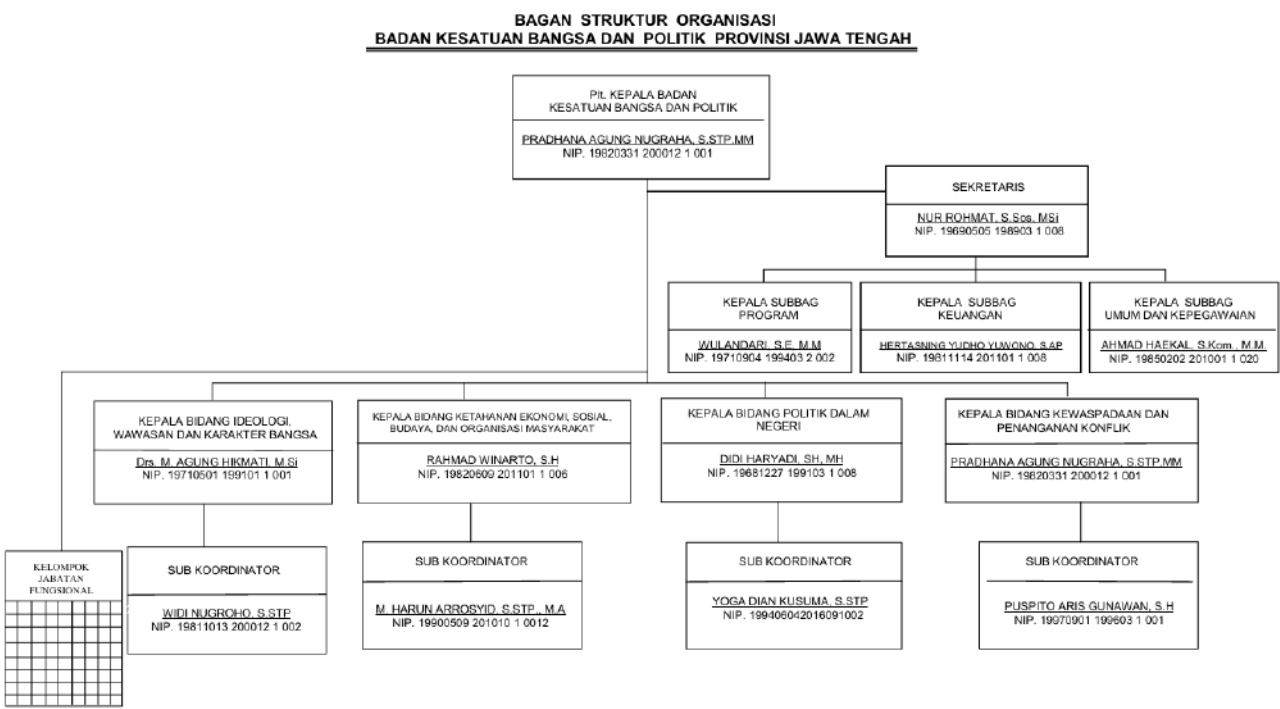
Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Politik Dalam Negeri
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

g. Kelompok Jabatan Fungsional



6.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembangaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.
- 3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi
- 4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
- 5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.1. Data Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah 71. Terdiri dari 46 pegawai PNS, 10 PPPK, dan 15 PPPK paruh waktu.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Status Pegawai

Status Pegawai	Jumlah
PNS	46
PPPK	10
PPPK Paruh Waktu	15
Total	71

Sedangkan, berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 14 orang pegawai berpendidikan S2 (Pasca Sarjana), 42 orang berpendidikan S1/DIV, 4 orang berpendidikan Diploma III, 11 orang berpendidikan SMA.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	14
Strata 1 / Diploma IV	42
Diploma III	4
SMA	11
Total	71

6.2. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB VII

PENUTUP

BAB 7

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2025. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0011108 Tanggal 19 Nopember 2025 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19820331 200012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

BERITA ACARA
INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)

Nomor : 000. 3 / 204 / 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Lantai 2 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah , Jalan A. Yani No. 160 Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Fajarina Setyawati,SE
NIP : 19821016 201001 2 020
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
2. Nama : Budi Mulyono
NIP : 19770220 200801 1 004
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa barang persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	1.1.7.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	17	698.000,00
Jumlah			17	698.000,00

Adapun secara detail persediaan tersebut terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Pembantu Pengurus Barang

Budi Mulyono

NIP. 19770220 200801 1 004

Pengurus Barang

Fajarina Setyawati,S.E.

NIP. 19821016 201001 2 020

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan



Pradhana Agung Nugraha, S.STP., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19820331 200012 1 001



BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME)
Nomor : 0801010000000000.BSO240001

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Fajarina Setyawati, S.E
NIP. : 198210162010012020
Pangkat/Gol : Penata /IIIc
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

II. Nama : Budi Mulyono
NIP. : 197702202008011004
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II d
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa persediaan pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, sebagai berikut dengan :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Total(Rp)
1	010000000026	Buku Ekspedisi [Buah]	1,00	16.000,00	16.000,00
2	010000000034	Post It Kecil [Buah]	1,00	25.000,00	25.000,00
3	010000000181	Bolpoint Boliner [Buah]	1,00	210.000,00	210.000,00
4	0100000002179	Stick Notes [Pak]	2,00	20.000,00	40.000,00
5	010000000276	Batu Baterai Kotak 9v [Buah]	1,00	18.000,00	18.000,00
6	010000001554	Bantalan Stempel [Buah]	2,00	17.000,00	34.000,00
7	010000001566	Tali Rafia [Buah]	1,00	25.000,00	25.000,00
8	010000001605	Lem Cair Tanggung [Buah]	1,00	18.000,00	18.000,00
9	010000002595	Perporator Kecil [Buah]	1,00	45.000,00	45.000,00
10	0100000039086	Flashdisk 64GB [Buah]	1,00	200.000,00	200.000,00
11	010000005095	Tinta Stempel [Buah]	1,00	7.000,00	7.000,00
12	010000005392	Steples Kecil 1 [Buah]	1,00	17.000,00	17.000,00
13	010000007610	Tipex Kenko [Buah]	1,00	18.000,00	18.000,00
14	010000007879	Setip [Buah]	1,00	7.000,00	7.000,00
15	010000009863	Penggaris Besi [Buah]	1,00	18.000,00	18.000,00
Jumlah			17,00		698.000,00

Petugas yang Terlibat

Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang


Budi Mulyono
NIP. 197702202008011004


Fajarina Setyawati, S.E
NIP. 198210162010012020

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Pradhana Agung Nugraha, S.STP., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19820331 200012 1 001



MUTASI ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 080101
Bidang : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2025		PENAMBAHAN						PELEPASAN						SALDO AKHIR Periode 202512	
				Jml.	Belanja Modal	REKLASIFIKASI		Jml.	Jumlah Tambah	REKLASIFIKASI		Jml.	Jumlah Kurang				
		Jml.	Dari Aset Tetap			Jml.	Ke Aset Lainnya										
										BMD	RKM			RKL	KIBL		
1	2	3	4	11		16		18		19		25		26			
1	1.3.1.01.01.04	3	12.011.143.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12.011.143.000		
2	1.3.2.01.03.04	1	640.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	640.150.000		
3	1.3.2.01.03.13	1	49.759.226	-	-	-	-	-	-	-	1	49.759.226	1	49.759.226	-		
4	1.3.2.02.01.01	1	380.397.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	380.397.000		
5	1.3.2.02.01.02	13	2.600.299.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.600.299.400		
6	1.3.2.02.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1.3.2.02.01.04	6	103.962.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	103.962.000		
8	1.3.2.05.01.01	1	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.700.000		
9	1.3.2.05.01.02	1	2.274.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.274.600		
10	1.3.2.05.01.03	3	100.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100.040.000		
11	1.3.2.05.01.04	46	203.784.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	203.784.145		
12	1.3.2.05.01.05	24	205.594.695	8	26.800.000	-	-	8	26.800.000	-	-	1	17.400.000	1	17.400.000		
13	1.3.2.05.02.01	284	571.076.350	23	47.558.700	-	-	23	47.558.700	-	-	-	-	307	618.635.050		
14	1.3.2.05.02.02	8	11.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11.930.000		
15	1.3.2.05.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	1.3.2.05.02.04	89	1.425.445.333	4	35.997.000	-	-	4	35.997.000	-	8	35.125.000	8	35.125.000	85		
17	1.3.2.05.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1.3.2.05.02.06	102	960.128.500	4	40.670.000	-	-	4	40.670.000	-	-	14	32.670.000	14	32.670.000		
19	1.3.2.05.02.07	12	59.540.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	59.540.876		
20	1.3.2.05.03.01	83	221.722.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	221.722.000		
21	1.3.2.05.03.04	5	19.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19.150.000		
22	1.3.2.06.01.01	70	428.518.000	8	22.200.000	-	-	8	22.200.000	-	-	-	-	78	450.718.000		
23	1.3.2.06.01.02	20	178.783.000	2	9.000.000	-	-	2	9.000.000	-	-	-	-	22	187.783.000		
24	1.3.2.06.02.01	11	91.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	91.700.000		
25	1.3.2.10.01.02	86	1.247.452.616	8	124.200.000	-	-	8	124.200.000	-	2	33.770.000	2	33.770.000	92		
26	1.3.2.10.02.01	1	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.600.000		
27	1.3.2.10.02.02	21	272.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	272.680.000		
28	1.3.2.10.02.03	91	309.547.508	9	50.348.000	-	-	9	50.348.000	-	4	7.731.000	4	7.731.000	96		
29	1.3.2.10.02.04	4	29.850.000	-	-	-	-	-	-	-	1	24.800.000	1	24.800.000	3		
30	1.3.3.01.01.01	3	6.679.824.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.679.824.085		
31	1.3.3.01.01.02	1	44.709.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44.709.000		
32	1.3.3.01.01.32	2	95.047.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	95.047.000		
33	1.3.3.04.01.01	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000.000		
34	1.3.3.04.01.05	2	101.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101.650.000		
35	1.3.5.01.01.01	845	63.486.100	-	-	-	-	-	-	751	54.386.700	-	751	54.386.700	94		
36	1.3.5.01.01.02	-	-	-	-	10	756.900	10	756.900	-	-	-	-	10	756.900		
37	1.3.5.01.01.03	29	2.210.550	-	-	8	1.200.700	8	1.200.700	-	-	-	-	37	3.411.250		
38	1.3.5.01.01.04	186	14.723.250	-	-	690	47.803.800	690	47.803.800	-	-	-	-	876	62.527.050		
39	1.3.5.01.01.05	-	-	-	-	1	72.000	1	72.000	-	-	-	-	1	72.000		
40	1.3.5.01.01.07	-	-	-	-	2	605.000	2	605.000	-	-	-	-	2	605.000		
41	1.3.5.01.01.09	1	199.500	-	-	40	3.948.300	40	3.948.300	-	-	-	-	41	4.147.800		
		2.057	29.160.077.734	66	356.773.700	751	54.386.700	817	411.160.400	751	54.386.700	31	201.255.226	782	255.641.926		



MUTASI ASET LAIN-LAIN
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 080101
Bidang : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Akun	Keterangan	Saldo Awal Tahun 2025		Penambahan						Penghapusan		Jumlah Kurang		Saldo Akhir			
					Reklas Aset tetap		Reklas dari Aset ATB		Jumlah Tambah		Penjualan							
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
					ASL		ATB				Pjl							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	20	21	28	29	30	31		
1	1.5.4.01.01.01.001	TANAH RUSAK BERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1.5.4.01.01.01.002	PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	604,00	1.701.101.417,00	31,00	201.255.226,00	-	-	31,00	201.255.226,00	553,00	1.463.955.584,00	553,00	1.463.955.584,00	82,00	438.401.059,00		
3	1.5.4.01.01.01.003	GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1.5.4.01.01.01.004	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN RUSAK BERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1.5.4.01.01.01.005	ASET TETAP LAINNYA RUSAK BERAT	1,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-	-		
6	1.5.4.01.01.02.001	ASET TETAP TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1.5.4.01.01.02.002	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	1.5.4.01.01.02.003	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1.5.4.01.01.02.004	ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	1.5.4.01.01.02.005	ASET TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	1.5.4.01.01.03.001	ASET LAIN-LAIN TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1.5.4.01.01.03.002	ASET LAIN-LAIN PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	1.5.4.01.01.03.003	ASET LAIN-LAIN GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1.5.4.01.01.03.004	ASET LAIN-LAIN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	1.5.4.01.01.03.005	ASET LAIN-LAIN ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	1.5.4.01.01.03.006	ASET LAIN-LAIN ASET TAK BERWUJUD	1,00	39.700.000,00	-	-	1,00	34.500.000,00	1,00	34.500.000,00	-	-	-	-	2,00	74.200.000,00		
			606	1.741.301.417	31	201.255.226	1	34.500.000	32	235.755.226	554	1.464.455.584	554	1.464.455.584	84	512.601.059		



MUTASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 080101
Bidang : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Uraian		SALDO AWAL TAHUN 2025						PELEPASAN								SALDO AKHIR			
					Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Jumlah Tambah	REKLASIFIKASI				Jml.	Reklas ke Aset Lainnya	Jml.	Jumlah Pelepasan	PERIODE 202512			
			Jml.	ReKlas Keluar					Jml.	Reklas ke Aset Tetap	Jml.	Reklas ke Aset Lainnya					Jml.	Jumlah Pelepasan	Jml.	Harga
1	2		3		5		13		15		16		17		19		20			
1	1.5.3.01.01.01	GOODWILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1.5.3.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1.5.3.01.01.03	HAK CIPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1.5.3.01.01.04	HAK PATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	8	371.457.780,00	-	32.731.680,00	32.731.680,00	-	-	-	-	1	34.500.000,00	1	34.500.000,00	7	369.689.460,00			
6	1.5.3.01.01.06	KAJIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1.5.3.01.01.07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	1.5.3.01.01.08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1.5.3.01.01.09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			8	371.457.780,00	-	32.731.680,00	32.731.680,00	-	-	-	-	1,00	34.500.000,00	1,00	34.500.000,00	7,00	369.689.460,00			

**PENGAKUAN BELANJA BARANG DAN JASA MENJADI PENERIMAAN PERSEDIAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
S/D BULAN DESEMBER 2025**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	LRA/SPJ Fungsional s/d Bulan Berkenaan (Rp)	Nilai Belanja Barang dan Jasa yang Diakui Menambah Stock Barang Persediaan (Rp)			Selisih		Input SIM Persediaan s/d Bulan Berkenaan	Selisih	
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Selisih LRA/SPJ Fungsional Dengan Pengakuan Persediaan	Keterangan		Selisih Belanja yang Diakui Persediaan dengan SIM Persediaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 6	8	9	10 = 6 - 9	11
BELANJA DAERAH	13.791.545.000,00	13.532.204.099,00	819.062.000,00	66.716.000,00	885.778.000,00	12.646.426.099,00		885.778.000,00	-	
BELANJA BARANG DAN JASA	13.791.545.000,00	13.532.204.099,00	819.062.000,00	66.716.000,00	885.778.000,00	12.646.426.099,00		885.778.000,00	-	
BELANJA BARANG	2.868.903.000,00	2.863.864.400,00	819.062.000,00	66.716.000,00	885.778.000,00	1.978.086.400,00		885.778.000,00	-	
Belanja Barang Pakai Habis	2.868.903.000,00	2.863.864.400,00	819.062.000,00	66.716.000,00	885.778.000,00	1.978.086.400,00		885.778.000,00	-	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-Bahan Kimia			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-Bahan Peledak			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-Bahan Baku	147.648.000,00	147.600.000,00	135.825.000,00	11.775.000,00	147.600.000,00			147.600.000,00	-	
Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-Barang dalam Proses			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-lsi tabung Pemadam Kebakaran			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-lsi Tabung Gas			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Persenjataan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			-	-	-	-		-	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	394.888.000,00	393.976.000,00	364.755.000,00	29.221.000,00	393.976.000,00			393.976.000,00	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	132.059.000,00	131.060.400,00	98.897.000,00	14.797.000,00	113.694.000,00	17.366.400,00	Fotocopy tdk msk persediaan	113.694.000,00	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.483.000,00	4.136.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	136.000,00	Jasa pos tidak masuk persediaan	4.000.000,00	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	57.607.000,00	57.607.000,00	53.212.000,00	4.395.000,00	57.607.000,00			57.607.000,00	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.013.000,00	16.013.000,00	12.485.000,00	3.528.000,00	16.013.000,00			16.013.000,00	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dam Perlengkapan Satwa			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata			-	-	-	-		-	-	
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.068.000,00	19.068.000,00	19.068.000,00	-	19.068.000,00			19.068.000,00	-	
Belanja Obat-Obatan-Obat			-	-	-	-		-	-	
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			-	-	-	-		-	-	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			-	-	-	-		-	-	
Belanja Barang untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga			-	-	-	-		-	-	
Belanja Barang untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya			-	-	-	-		-	-	

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	LRA/SPJ Fungsional s/d Bulan Berkenaan (Rp)	Nilai Belanja Barang dan Jasa yang Diakui Menambah Stock Barang Persediaan (Rp)			Selisih		Input SIM Persediaan s.d Bulan Berkenaan	Selisih	
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Selisih LRA/SPJ Fungsional Dengan Pengakuan Persediaan	Keterangan		Selisih Belanja yang Diakui Persediaan dengan SIM Persediaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 6	8	9	10 = 6 - 9	11
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Dalam Proses			-	-	-	-		-	-	
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Dalam Proses Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	227.280.000,00	226.064.000,00	-	-	-	226.064.000,00	Mamin tdk msk persediaan	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	89.400.000,00	89.325.000,00	-	-	-	89.325.000,00	Mamin tdk msk persediaan	-	-	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			-	-	-	-		-	-	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial			-	-	-	-		-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.646.637.000,00	1.645.195.000,00	-	-	-	1.645.195.000,00	Mamin tdk msk persediaan	-	-	
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Penyelamatan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Slaga			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Teknik			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Kerja Bengkel			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian KORPRI			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Adat Daerah			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Batik Tradisional			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pakaian Olahraga	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	-	34.300.000,00	-		34.300.000,00	-	
Belanja Pakaian Paskibraka	99.520.000,00	99.520.000,00	99.520.000,00	-	99.520.000,00	-		99.520.000,00	-	
Belanja Pakaian Jas/Safari			-	-	-	-		-	-	
Belanja Barang Sampel Pangan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-		-	-	
Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja			-	-	-	-		-	-	
Belanja Komponen-Komponen Jembatan Praktekan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Komponen-Komponen Peralatan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu			-	-	-	-		-	-	
Belanja Komponen-Attachment			-	-	-	-		-	-	
Belanja Komponen-Komponen Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pipa-Pipa Baja			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pipa-Pipa Beton Praktekan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pipa-Pipa Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Jasa yang Menjadi Persediaan	10.922.642.000,00	10.668.339.699,00	-	-	-	10.668.339.699,00		-	-	
Belanja Jasa Kantor	10.922.642.000,00	10.668.339.699,00	-	-	-	10.668.339.699,00		-	-	
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			-	-	-	-		-	-	

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	LRA/SPJ Fungsional s/d Bulan Berkenaan (Rp)	Nilai Belanja Barang dan Jasa yang Diakui Menambah Stock Barang Persediaan (Rp)			Selisih		Input SIM Persediaan s.d Bulan Berkenaan	Selisih	
			s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan Ini	Selisih LRA/SPJ Fungsional Dengan Pengakuan Persediaan	Keterangan		Selisih Belanja yang Diakui Persediaan dengan SIM Persediaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 6	8	9	10 = 6 - 9	11
Belanja Sewa Tanah			-	-	-	-		-	-	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			-	-	-	-		-	-	
Belanja Sewa Gedung dan bangunan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Jasa Konstruksi Non Konstruksi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)			-	-	-	-		-	-	
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			-	-	-	-		-	-	
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK			-	-	-	-		-	-	
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pemeliharaan Tanah			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	-	-	-		-	-	
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud			-	-	-	-		-	-	



Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Pradhana Agung Nugraha S.STP., M.M.
NIP. 19820331 200012 1 001

Bendahara Pengeluaran

Joko Wicanto A.Md
NIP. 19920825 202012 1 006

Pengguna Barang

Fajarina Setyanwati S.E.
NIP. 19821016 201001 2 020

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI PER DESEMBER 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

No	URAIAN	APBD 2025 (Rp)	APBD 2025 yang Dikomitmenkan untuk Belanja PDN (Rp)	Persentase APBD 2025 yang Dikomitmenkan untuk Belanja PDN (%)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)
I	BELANJA OPERASI	18.837.626.000,00	18.837.626.000,00	100,00%	18.546.058.417,00	98,45%
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	18.837.626.000,00	18.837.626.000,00	100,00%	18.546.058.417,00	98,45%
I.2	Belanja Hibah Barang /Jasa			0,00%		0,00%
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa			0,00%		0,00%
II	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	356.773.700,00	89,19%
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	356.773.700,00	89,19%
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00%		0,00%
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			0,00%		0,00%
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			0,00%		0,00%
II.5	Belanja Modal Aset Lainnya			0,00%		0,00%
	Total (1+2)	19.237.626.000,00	19.237.626.000,00	100,00%	18.902.832.117,00	98,16%

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 – 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 14/BA-RKN/TWI-SKPD/IV/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.**
NIP : **19851204 200902 2 012**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DANANG ARI PRABOWO, SH**
NIP : **19691014 199203 1 003**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BAPENDA Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data realisasi APBD, rekonsiliasi dengan SIPENARI dan realisasi P3DN TW I Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Lima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Semarang, 16 April 2025



Pihak Kedua

DANANG ARI PRABOWO, SH
NIP. 19691014 199203 1 003



Pihak Pertama

DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012



Pihak Ketiga

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD
Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2025

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
Pendapatan	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	-		-	
Lain-lain PAD yang Sah	-		-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	
Belanja	47.490.445.801	47.490.445.801	-	
Belanja Pegawai	2.472.637.482	2.472.637.482	-	
Belanja Barang dan Jasa	4.311.885.319	4.311.885.319	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	40.705.923.000	40.705.923.000	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Maret 2025 terlampir.

Pihak Ketiga

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

Pihak Pertama

DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPENARI
Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2025

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	SIPENARI	Selisih	Keterangan
Pendapatan	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPENARI periode 1 Januari s/d 31 Maret 2025 terlampir.

Pihak Kedua



DANANG ARI PRABOWO, SH
NIP. 19691014 199203 1 003

Pihak Pertama



DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

Pihak Ketiga



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

menyatakan bahwa realisasi belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sampai dengan 31 Maret Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi		4.311.885.319
1. Belanja Barang dan jasa	:	4.311.885.319
2. Belanja hibah barang/jasa	:	-
3. Belanja bantuan sosial barang/jasa	:	-
Belanja Modal		-
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	-
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	-
6. Belanja Modal jalan, jaringan & irigasi	:	-
7. Belanja Modal Aset tetap lainnya	:	-
Jumlah Total Realisasi		4.311.885.319

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang, 16 April 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah


Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa semua Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran serta Penerimaan Pembantu dan/atau Pengeluaran Pembantu telah melakukan pemeriksaan kas sampai tanggal 31 Maret 2025 dan telah melakukan pembukuan atas transaksi keuangan dalam Buku Kas Umum (BKU) s/d Maret 2025. Terlampir ringkasan hasil posisi uang sesuai pemeriksaan kas dan pembukuan di masing-masing bendahara.

Data yang kami sampaikan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan untuk kelengkapan data keuangan triwulanan.

Dibuat di Semarang, 16 April 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK" at the top and "PROVINSI JAWA TENGAH" at the bottom. The inner circle contains the text "BAKESBANGPOL" in the center. A signature is written over the stamp.

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501 199101 1 001

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KAS

No	Nama Jabatan	Uraian	Kas Riil Di Bendahara	Kas di Buku Kas Umum	Selisih	Keterangan
1	Bendahara Pengeluaran	Uang Tunai	5.147.500	5.147.351	149	Pembulatan ke atas uang pecahan 351
		Saldo Bank	238.927.327	238.927.327	-	
		Jumlah	244.074.827	244.074.678	149	
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Uang Tunai	-	-	-	
	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	Saldo Bank	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Uang Tunai	50.620.000	50.620.000	-	
	Bidang Ketahanan Bangsa	Saldo Bank	59.818.235	59.818.235	-	
		Jumlah	110.438.235	110.438.235	-	
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Uang Tunai	-	-	-	
	Bidang Politik Dalam Negeri	Saldo Bank	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	
JUMLAH UANG KAS TUNAI			55.767.500	55.767.351	149	
JUMLAH SALDO DI BANK			298.745.562	298.745.562	-	
TOTAL			354.513.062	354.512.913	149	

Catatan : Poin 3 dan poin 6 dilanjutkan sesuai dengan kondisi di SKPD

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 – 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 14/BA-RKN/SMTI-SKPD/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.**
NIP : **19851204 200902 2 012**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data per 30 Juni 2025 Tahun Anggaran 2025 atas:

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD;
2. Realisasi Pendapatan E-Penatausahaan dengan SIPENARI;
3. Realisasi Pendapatan dan Belanja E-Penatausahaan dengan SIPD;
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang menjadi aset tetap;
5. Rekapitulasi Persediaan;
6. Realisasi P3DN; dan
7. Pemeriksaan Posisi Kas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (Dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001



DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
Pendapatan	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	-		-	
Lain-lain PAD yang Sah	-		-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	
Belanja	121.399.287.405	121.399.287.405	-	
Belanja Pegawai	4.816.399.072	4.816.399.072	-	
Belanja Barang dan Jasa	7.188.295.333	7.188.295.333	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	109.270.393.000	109.270.393.000	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	124.200.000	124.200.000	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025 terlampir.

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah



DRS. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPENARI
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	SIPENARI	Selisih	Keterangan
Pendapatan	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	-		-	
Lain-lain PAD yang Sah	-		-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPENARI periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025 terlampir.

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah


Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501199101 1 001

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPD
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	SIPD	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah			-	
Retribusi Daerah			-	
Lain-lain PAD yang Sah			-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Hibah			-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-	
BELANJA DAERAH	121.399.287.405	121.399.270.605	16.800	
Belanja Operasi	121.275.087.405	121.275.070.605	16.800	
Belanja Pegawai	4.816.399.072	4.816.399.072	-	
Belanja Barang dan Jasa	7.188.295.333	7.188.278.533	16.800	Pengembalian Iuran JKK Bulan Juli 2025 diinput Mei 2025
Belanja Subsidi			-	
Belanja Hibah	109.270.393.000	109.270.393.000	-	
Belanja Bantuan Sosial			-	
Belanja Modal	124.200.000	124.200.000	-	
Belanja Modal Tanah			-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.200.000	124.200.000	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			-	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-	
Belanja Modal Aset Lainnya			-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga			-	
Belanja Transfer	-	-	-	
Belanja Bagi Hasil			-	
Belanja Bantuan Keuangan			-	

--	--	--	--	--

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPD periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025 terlampir.

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501 199101 1 001

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL YANG MENJADI ASET TETAP

Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025

Uraian	Aset		Selisih	Keterangan
	Akuntansi	Sim Aset		
Belanja Barang dan Jasa			-	
Belanja Modal	124.200.000	306.425.700	(182.225.700)	
Tanah	-		-	
Alat Besar	-		-	
Alat Angkutan	-		-	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-		-	
Alat Pertanian	-		-	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	-	151.025.700	(151.025.700)	BAST sudah ada, tetapi pembayaran dilakukan sesuai RKO di Semester 2
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	-	31.200.000	(31.200.000)	BAST sudah ada, tetapi pembayaran dilakukan sesuai RKO di Semester 2
Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-		-	
Alat Laboratorium	-		-	
Alat Persenjataan	-		-	
Alat Komputer	124.200.000	124.200.000	-	
Alat Eksplorasi	-		-	
Alat Pengeboran	-		-	
Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-		-	
Alat Bantu Eksplorasi	-		-	
Alat Keselamatan Kerja	-		-	
Alat Peraga	-		-	
Peralatan Proses/Produksi	-		-	
Rambu Rambu	-		-	
Peralatan Olah Raga	-		-	
Peralatan dan Mesin BOS	-		-	
Peralatan dan Mesin BLUD	-		-	
Bangunan Gedung	-		-	
Monumen	-		-	
Bangunan Menara	-		-	
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-		-	
Gedung dan Bangunan BLUD	-		-	
Jalan Dan Jembatan	-		-	
Bangunan Air	-		-	
Instalasi	-		-	
Jaringan	-		-	
Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-		-	
Bahan Perpustakaan	-		-	
Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	-		-	
Hewan	-		-	

TRUE

Biota Perairan		-		-	
Tanaman		-		-	
Barang Koleksi Non Budaya		-		-	
Aset Tidak Berwujud		-		-	
Aset Tetap Lainnya BOS		-		-	
Aset Tetap Lainnya BLUD		-		-	
Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-		-	
Aset Lainnya BLUD		-		-	

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501199101 1 001

REKAPITULASI PERSEDIAAN
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi Belanja Barang (LRA SKPD)	Penerimaan Barang Jasa 30 Juni 2025 (SIM ASET)	Selisih	Keterangan
Persediaan			-	
Barang Pakai Habis	983.268.900	361.835.500	621.433.400	Belanja Cetak 6.296.400
				Belanja Makan Minum Rapat 75.185.000
				Belanja Makan Minum Tamu 33.540.000
				Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan 506.412.000
Barang Tak Habis Pakai	-		-	
Barang Bekas Dipakai	-		-	
Total	983.268.900	361.835.500	621.433.400	

NB: semua kekurangan dan perbedaan akan diselesaikan paling lambat 28 Juli 2025

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

menyatakan bahwa realisasi belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sampai dengan 30 Juni Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi		7.188.295.333
1. Belanja Barang dan jasa	:	7.188.295.333
2. Belanja hibah barang/jasa	:	-
3. Belanja bantuan sosial barang/jasa	:	-
Belanja Modal		124.200.000
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	124.200.000
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	-
6. Belanja Modal jalan, jaringan & irigasi	:	-
7. Belanja Modal Aset tetap lainnya	:	-
Jumlah Total Realisasi		7.312.495.333

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa semua Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran serta Penerimaan Pembantu dan/atau Pengeluaran Pembantu telah melakukan pemeriksaan kas sampai tanggal 30 Juni 2025 dan telah melakukan pembukuan atas transaksi keuangan dalam Buku Kas Umum (BKU) s/d Juni 2025. Terlampir ringkasan hasil posisi uang sesuai pemeriksaan kas dan pembukuan di masing-masing bendahara.

Data yang kami sampaikan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan untuk kelengkapan data keuangan triwulanan.

Dibuat di Salatiga, 23 Juli 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501 199101 1 001

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KAS

No	Nama Jabatan	Uraian	Kas Riil Di Bendahara	Kas di Buku Kas Umum	Selisih	Keterangan
1	Bendahara Pengeluaran	Uang Tunai	25.417.000	25.416.549	451	
		Saldo Bank	10.540.523	10.540.523	-	
		Jumlah	35.957.523	35.957.072	451	
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Uang Tunai	-	-	-	
	Bidang Ideologi	Saldo Bank	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Uang Tunai	-	-	-	
	Bidang Poldagri	Saldo Bank	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Uang Tunai	82.337.100	82.337.060	40	
	Bidang Ketahanan Bangsa	Saldo Bank	73.966.072	73.966.072	-	
		Jumlah	156.303.172	156.303.132	40	
6	Bendahara Penerimaan	Uang Tunai			-	
		Saldo Bank			-	
		Jumlah	-	-	-	
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	Uang Tunai			-	
		Saldo Bank			-	
		Jumlah	-	-	-	
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	Uang Tunai			-	
		Saldo Bank			-	
		Jumlah	-	-	-	
JUMLAH UANG KAS TUNAI			107.754.100	107.753.609	491	
JUMLAH SALDO DI BANK			84.506.595	84.506.595	-	
TOTAL			192.260.695	192.260.204	491	

Berita Acara Penutupan Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekening Koran terlampir
Catatan : Poin 3 dan poin 6 dilanjutkan sesuai dengan kondisi di SKPD

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP: 19710501 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomer 29 Semarang Kode Pos 50164 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman <http://bpkad.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 42/BAR-PAJAK/SKPD/VII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **SRI SULASTRI, S.E., M.M.**
NIP : 19700519 199503 2 002
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, MSi.**
NIP : 19710501 199101 1 001
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan Rekonsiliasi Data Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pusat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN	BUD (Rp)		SKPD (Rp)		KET.
		Pemungutan	Penyetoran	Pemungutan	Penyetoran	
1	PPh 21	476.489.045	476.489.045	476.489.045	476.489.045	
2	PPh 22	1.193.536	1.193.536	1.193.536	1.193.536	
3	PPh 23	4.919.201	4.919.201	4.919.201	4.919.201	
4	PPh 26	-	-	-	-	
5	PPh 4 (2)	80.000	80.000	80.000	80.000	
6	PPN	27.083.737	27.083.737	27.083.737	27.083.737	
	Total	509.765.519	509.765.519	509.765.519	509.765.519	

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah


Drs MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, MSi.
NIP. 19710501 199101 1 001

Dibuat di Salatiga, 22 Juli 2025
Pihak Pertama
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah


SRI SULASTRI, S.E., M.M.
NIP. 19700519 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614. Telepon 8311174
Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.bkpad.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bkpad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 42/BA-REKON/SKPD/VII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **SRI SULASTRI, SE., M.M.**
NIP : 19700519 199503 2 002
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : 19710501 199101 1 001
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut .

NO	URAIAN	REALISASI KASDA (Rp)	REALISASI SKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KET.
	Penerimaan				
1	Pendapatan	-	-		
2	Pengembalian Sisa TU	5.105.881.108	5.105.881.108		
3	Contrapost	3.696.359	3.696.359		
	Total	5.109.577.4671	5.109.577.4671		
	Pengeluaran (SP2D)				
1	UP	387.000.000	387.000.000		
2	GU	2.416.211.696	2.416.211.696		
3	TU	9.810.935.949	9.810.935.949		
4	LS Pegawai	4.816.584.431	4.816.584.431		
5	LS Barang & Jasa	109.270.393.000	109.270.393.000		
	Total	126.701.125.076	126.701.125.076		

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

Dibuat di Salatiga, 22 Juli 2025

Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH



SRI SULASTRI, SE., M.M.
NIP. 19700519 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 – 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 14/BA-RKN/TWIII-SKPD/X/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.**
NIP : **19851204 200902 2 012**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data per 30 September 2025 Tahun Anggaran 2025 atas:

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD;
2. Realisasi Pendapatan E-Penatausahaan dengan SIPENARI;
3. Realisasi Pendapatan dan Belanja E-Penatausahaan dengan SIPD;
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang menjadi aset tetap;
5. Rekapitulasi Persediaan;
6. Realisasi P3DN; dan
7. Rencana Anggaran Kas, Rencana Kerja Operasional dan Rencana Umum Pengadaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (Dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

Pihak Pertama

DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD
Periode 1 Januari s/d 30 September 2025

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	
BELANJA DAERAH	166.294.951.565	166.294.951.565	-	
Belanja Operasi	165.988.525.865	165.988.525.865	-	
Belanja Pegawai	6.625.605.820	6.625.605.820	-	
Belanja Barang dan Jasa	11.876.345.045	11.876.345.045	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	147.486.575.000	147.486.575.000	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	306.425.700	306.425.700	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 30 September 2025 terlampir.

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501 199101 1 001

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPENARI
Periode 1 Januari s/d 30 September 2025

Uraian	E-Penatausahaan	SIPENARI	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPENARI periode 1 Januari s/d 30 September 2025 terlampir.

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPD

Periode 1 Januari s/d 30 September 2025

Uraian	E-Penatausahaan	SIPD	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Hibah	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
BELANJA DAERAH	166.294.951.565	166.294.307.938	643.627	
Belanja Operasi	165.988.525.865	165.987.882.238	643.627	
Belanja Pegawai	6.625.605.820	6.624.962.193	643.627	Pembayaran Kekurangan Gaji & Iuran BPJS Kes, JKK, JKM an. Herra Puspita, S.Sos masih proses input di SIPD
Belanja Barang dan Jasa	11.876.345.045	11.876.345.045	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	147.486.575.000	147.486.575.000	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	306.425.700	306.425.700	-	
Belanja Modal Tanah	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.425.700	306.425.700	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	

Belanja Transfer		-	-	-	
Belanja Bagi Hasil				-	
Belanja Bantuan Keuangan				-	

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPD periode 1 Januari s/d 30 September 2025 terlampir.

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL YANG MENJADI ASET TETAP

Periode 1 Januari s/d 30 September 2025

Uraian	Aset		Selisih	Keterangan
	Akuntansi	Sim Aset		
Belanja Barang dan Jasa			-	
Belanja Modal	306.425.700	306.425.700	-	
Tanah	-	-	-	
Alat Besar	-	-	-	
Alat Angkutan	-	-	-	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	-	-	
Alat Pertanian	-	-	-	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	124.225.700	151.025.700	(26.800.000)	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	58.000.000	31.200.000	26.800.000	
Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-	-	-	
Alat Laboratorium	-	-	-	
Alat Persenjataan	-		-	
Alat Komputer	124.200.000	124.200.000	-	
Alat Eksplorasi	-		-	
Alat Pengeboran	-		-	
Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-		-	
Alat Bantu Eksplorasi	-		-	
Alat Keselamatan Kerja	-		-	
Alat Peraga	-		-	
Peralatan Proses/Produksi	-		-	
Rambu Rambu	-		-	
Peralatan Olah Raga	-		-	
Peralatan dan Mesin BOS	-		-	
Peralatan dan Mesin BLUD	-		-	
Bangunan Gedung	-		-	
Monumen	-		-	
Bangunan Menara	-		-	
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-		-	
Gedung dan Bangunan BLUD	-		-	
Jalan Dan Jembatan	-	-	-	
Bangunan Air	-		-	
Instalasi	-		-	
Jaringan	-		-	
Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-		-	
Bahan Perpustakaan	-		-	

Barang Bercorak		-		-	
Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga		-		-	
Hewan		-		-	
Biota Perairan		-		-	
Tanaman		-		-	
Barang Koleksi Non Budaya		-		-	
Aset Tidak Berwujud		-		-	
Aset Tetap Lainnya BOS		-		-	
Aset Tetap Lainnya BLUD		-		-	
Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-		-	
Aset Lainnya BLUD		-		-	

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REKAPITULASI PERSEDIAAN
Periode 1 Januari s/d 30 September 2025

Uraian	Realisasi Belanja Barang (LRA SKPD)	Penerimaan Barang Jasa 30 September 2025 (SIM ASET)	Selisih	Keterangan
Persediaan			-	
Barang Pakai Habis	1.929.270.700,00	662.322.500,00	1.266.948.200,00	Fotocopy, Jasa Pos, Makan Minum tidak masuk dalam persediaan
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	
Total	1.929.270.700,00	662.322.500,00	1.266.948.200,00	

NB: semua kekurangan dan perbedaan akan diselesaikan paling lambat 26 Oktober 2025

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

menyatakan bahwa realisasi belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sampai dengan 30 September Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi		11.876.345.045
1. Belanja Barang dan Jasa	:	11.876.345.045
2. Belanja Hibah Barang/Jasa	:	-
3. Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	:	-
Belanja Modal		306.425.700
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	306.425.700
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	-
6. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	:	-
7. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	:	-
8. Belanja Modal Aset Lainnya	:	-
Jumlah Total Realisasi		12.182.770.745

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah


Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SAKD
Periode 1 Januari s/d 30 September 2025

Uraian	E-Penatausahaan	SAKD	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Hibah	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
BELANJA DAERAH	166.294.951.565	166.294.951.565	-	
Belanja Operasi	165.988.525.865	165.988.525.865	-	
Belanja Pegawai	6.625.605.820	6.625.605.820	-	
Belanja Barang dan Jasa	11.876.345.045	11.876.345.045	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	147.486.575.000	147.486.575.000	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	306.425.700	306.425.700	-	
Belanja Modal Tanah	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.425.700	306.425.700	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	

Belanja Bagi Hasil				-	
Belanja Bantuan Keuangan				-	

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPD periode 1 Januari s/d 30 September 2025 terlampir.

Dibuat di Surakarta, 22 Oktober 2025

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah


Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 14/BA-RKN/TWIV-SKPD/I/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.**
NIP : **19851204 200902 2 012**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data per 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 atas:

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD;
2. Realisasi Pendapatan E-Penatausahaan dengan SIPENARI;
3. Realisasi Pendapatan dan Belanja E-Penatausahaan dengan SIPD;
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang menjadi aset tetap;
5. Rekapitulasi Rincian Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap;
6. Rekapitulasi Persediaan;
7. Realisasi P3DN; dan
8. *Checklist* Kelengkapan Data Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (Dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026



REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	
BELANJA DAERAH	196.095.397.966	196.095.397.966	-	
Belanja Operasi	195.738.624.266	195.738.624.266	-	
Belanja Pegawai	8.354.175.849	8.354.175.849	-	
Belanja Barang dan Jasa	18.546.058.417	18.546.058.417	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	168.838.390.000	168.838.390.000	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	356.773.700	356.773.700	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 terlampir.

Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah


Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 197105011991011001

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPENARI
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025

Uraian	E-Penatausahaan	SIPENARI	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	-		-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-		-	
Lain-lain PAD yang Sah	-		-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPENARI periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 terlampir.

Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPD
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025

Uraian	E-Penatausahaan	SIPD	Selisih	Keterangan
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	-		-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-		-	
Lain-lain PAD yang Sah	-		-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Hibah	-		-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	
BELANJA DAERAH	196.095.397.966	196.094.593.650	804.316	
Belanja Operasi	195.738.624.266	195.737.819.950	804.316	
Belanja Pegawai	8.354.175.849	8.353.371.533	804.316	Belanja Iuran JKK dan JKM ASN belum input SIPD karena anggaran belum diperbaiki
Belanja Barang dan Jasa	18.546.058.417	18.546.058.417	-	
Belanja Subsidi	-		-	
Belanja Hibah	168.838.390.000	168.838.390.000	-	
Belanja Bantuan Sosial	-		-	
Belanja Modal	356.773.700	356.773.700	-	
Belanja Modal Tanah	-		-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.773.700	356.773.700	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		-	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-		-	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-		-	
Belanja Modal Aset Lainnya	-		-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	-		-	
Belanja Transfer	-	-	-	
Belanja Bagi Hasil			-	
Belanja Bantuan Keuangan			-	

Rincian Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD E-PEN dengan SIPD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 terlampir.

Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL YANG MENJADI ASET TETAP

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025

Uraian	Aset		Selisih	Keterangan
	Akuntansi	Sim Aset		
Belanja Barang dan Jasa			-	
Belanja Modal	356.773.700	356.773.700	-	
Tanah	-		-	
Alat Besar	-		-	
Alat Angkutan	-		-	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-		-	
Alat Pertanian	-		-	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	124.225.700	151.025.700	(26.800.000)	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	58.000.000	31.200.000	26.800.000	
Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-		-	
Alat Laboratorium	-		-	
Alat Persenjataan	-		-	
Alat Komputer	174.548.000	174.548.000	-	
Alat Eksplorasi	-		-	
Alat Pengeboran	-		-	
Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-		-	
Alat Bantu Eksplorasi	-		-	
Alat Keselamatan Kerja	-		-	
Alat Peraga	-		-	
Peralatan Proses/Produksi	-		-	
Rambu Rambu	-		-	
Peralatan Olah Raga	-		-	
Peralatan dan Mesin BOS	-		-	
Peralatan dan Mesin BLUD	-		-	
Bangunan Gedung	-		-	
Monumen	-		-	
Bangunan Menara	-		-	
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-		-	
Gedung dan Bangunan BLUD	-		-	
Jalan Dan Jembatan	-		-	
Bangunan Air	-		-	
Instalasi	-		-	
Jaringan	-		-	
Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-		-	
Bahan Perpustakaan	-		-	
Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	-		-	
Hewan	-		-	
Biota Perairan	-		-	
Tanaman	-		-	
Barang Koleksi Non Budaya	-		-	
Aset Tidak Berwujud	-		-	
Aset Tetap Lainnya BOS	-		-	
Aset Tetap Lainnya BLUD	-		-	
Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-		-	
Aset Lainnya BLUD	-		-	

Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501 199101 1 001

REKAPITULASI PERSEDIAAN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi Belanja Barang (LRA SKPD)	Penerimaan Barang Jasa (SIM ASET)	Selisih	Keterangan
Persediaan			-	
Barang Pakai Habis	2.863.864.400,00	885.778.000,00	1.978.086.400,00	Fotocopy, Jasa Pos, dan Makan Minum tidak masuk persediaan
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	
Total	2.863.864.400,00	885.778.000,00	1.978.086.400,00	

Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si

NIP. 19710501 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si**
NIP : **19710501 199101 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

menyatakan bahwa realisasi belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi		18.546.058.417
1. Belanja Barang dan Jasa	:	18.546.058.417
2. Belanja Hibah Barang/Jasa	:	-
3. Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	:	-
Belanja Modal		356.773.700
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	356.773.700
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	
6. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	:	
7. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	:	
8. Belanja Modal Aset Lainnya	:	
Jumlah Total Realisasi		18.902.832.117

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah


Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

Checklist Kelengkapan Data Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan

No	Uraian	Kelengkapan	Nominal	Keterangan
1	SPJ Fungsional Pendapatan per 31 Desember 2025	-	-	
2	SPJ Fungsional Belanja per 31 Desember 2025	V	-	
3	Alasan Realisasi Pendapatan dan Belanja kurang dari 95% serta Pendapatan kurang dari 95% dan lebih dari 100% per 31 Desember 2024	V	-	revisi untuk keterangannya
4	Laporan realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri per 31 Desember 2025	V		
5	Laporan realisasi belanja barang dan Jasa yang menjadi persediaan per 31 Desember 2025	V	18.902.832.117,00	
6	Laporan realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting Per 31 Desember 2025	-	-	
7	Laporan realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Per 31 Desember 2025	-	-	
8	Rekap Piutang Per 31 Desember 2025	-	-	
9	Rincian dan Koreksi Piutang per 31 Desember 2025 serta Pembayaran di Tahun 2026	-	-	
10	Rekap Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025	V	60,849,841.33	
11	Rekap Utang dan Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 (Utang Non Jasa Pelayanan)	-	nihil	
12	Rincian dan Koreksi Utang per 31 Desember 2025 serta Pembayaran di Tahun 2026	-	nihil	
13	Rekap Kas per 31 Desember 2025 dan Bukti Penyetoran STS di Tahun 2026	-	nihil	
14	Rekening Koran seluruh BP/BPP/BPEN/BPENP per 31 Desember 2025	V	-	
15	Rincian Hibah Barang berupa Aset dan Persediaan per 31 Desember 2025	-	nihil	
16	Daftar Belanja yang dikapitalisasi ke Aset Tetap	-	nihil	
17	Kertas Kerja Aset Tetap, Aset Lainnya (cetak sim asset)	V		
18	Kertas Kerja Persediaan (cetak sim asset)	V		
19	BA Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2025	V	698.000	
20	Draft Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan	-		
21	Cetak Realisasi Pendapatan Sipenari per 31 Desember 2025	-		
22	Perbandingan Selisih Pendapatan E-Penatausahaan dengan Sipenari per 31 Desember 2025	-		
23	Cetak LRA SIPD per 31 Desember 2025	V		
24	Perbandingan Selisih LRA E-Penatausahaan dengan SIPD per 31 Desember 2025	-		
TAMBAHAN UNTUK BLUD				
1	SP3B BLUD per 31 Desember 2025			

2	Rekap Klaim Tagihan BLUD 2025 yang Diverifikasi di Tahun 2026			
3	Rekap Utang Jasa Pelayanan per 31 Desember 2025			
4	Daftar Persediaan Obat Rusak/Kadaluarsa			

Dibuat di Semarang, 8 Januari 2026

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASURANSI DAN SEWA DIBAYAR DIMUKA 2025

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPJKAN	JANGKA WAKTU ASURANSI		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARI	JUMLAH HARI YG JADI BEBAN	JUMLAH HARI YG JADI BELANJA DIBAYAR DIMUKA	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=5-12
	ASURANSI											
	Kendaraan Roda 4 atau lebih			60.688.748,18							46.428.550,52	14.260.197,66
1	Toyota Kijang	2002	H - 1655 - XG	2.607.798,40	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	1.995.037,03	612.761,37
2	Toyota Kijang	2003	H - 1203 - XG	2.635.112,56	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	2.015.933,11	619.179,45
3	Toyota Kijang	2003	H - 9504 - FG	2.931.512,74	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	2.242.687,34	688.825,40
4	Toyota Kijang	2004	H - 1205 - XG	2.922.108,59	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	2.235.492,91	686.615,68
5	Toyota Kijang	2004	H - 1652 - XG	2.922.108,59	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	2.235.492,91	686.615,68
6	Toyota Kijang	2004	H - 9504 - UR	2.922.108,59	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	2.235.492,91	686.615,68
7	Toyota Avanza	2013	H - 9520 - AZ	3.885.791,47	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	2.972.736,64	913.054,83
8	Toyota Innova	2014	H - 9511 - FZ	6.068.069,05	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	4.642.238,62	1.425.830,43
9	Toyota Avanza	2014	H - 9518 - FZ	3.943.134,44	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	3.016.605,58	926.528,86
10	Toyota Innova Luxury	2015	H - 1270 - XG	6.721.274,44	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	5.141.958,59	1.579.315,85
11	Toyota Avanza Veloz	2015	H - 1207 - XG	4.047.280,18	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	3.096.279,92	951.000,26
12	Toyota Innova	2016	H - 1842 - XG	5.635.673,39	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	4.311.444,12	1.324.229,27
13	Toyota Innova V	2018	H - 35	8.107.481,55	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	6.202.444,90	1.905.036,65
14	Toyota Avanza 1,3 G	2018	H - 9503 - RZ	5.339.294,19	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	4.084.705,94	1.254.588,25
	Kendaraan Roda 2 dan 3			445.697,82							340.971,00	104.726,82
1	Honda Supra X	2014	H - 9871 - TG	74.282,97	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	56.828,50	17.454,47
2	Honda Supra X	2014	H - 9872 - TG	74.282,97	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	56.828,50	17.454,47
3	Honda Supra X	2015	H - 6188 - XG	74.282,97	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	56.828,50	17.454,47
4	Honda Supra X	2015	H - 6189 - XG	74.282,97	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	56.828,50	17.454,47
5	Honda Supra X	2015	H - 6190 - XG	74.282,97	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	56.828,50	17.454,47
6	Honda Supra X	2015	H - 6191 - XG	74.282,97	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	56.828,50	17.454,47
	Gedung dan Bangunan			18.404.989,00							14.080.319,46	4.324.669,54
1	Asuransi Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik flexas + others (Pembulatan)			6.200.089,00	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	4.743.237,49	1.456.851,51
	a) Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah			4.366.260,00								
	b) Inventaris Kantor			1.833.829,00								
2	Asuransi Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik EQ			12.204.900,00	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	366	280,00	86,00	9.337.081,97	2.867.818,03
	a) Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah			8.595.000,00								
	b) Inventaris Kantor			3.609.900,00								
	JUMLAH ASURANSI			79.539.435,00							60.849.840,98	18.689.594,02